



SKRIPSI

Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era

Emmanuel Macron (2017-2019)

Diajukan oleh

Afdhol Pratama Hadie Putra

NIM: 16323064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era Emmanuel
Macron (2017-2019)**

SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi
Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan
Internasional Pada Tanggal
14 Juni 2021

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.)
NIK. 123230101

Dewan Penguji:

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP,M.Sc
2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
3. Gustri Eni Putri, S.IP, M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afdhol Pratama Hadie Putra

No. Mahasiswa:16323064

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era Emmanuel Macron (2017-2019)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara nyata meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Afdhol Pratama Hadie Putra.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis masih senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemic ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk;

Kedua Orangtua

Terima kasih kepada kedua orangtua yang selalu mengingatkan penulis akan kewajiban ini. Tidak lupa juga doa dan dukungan yang tak terhingga serta menjadi penyemangat utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Saudara dan Keluarga

Terima kasih atas semua doa, dukungan dan semangat yang senantiasa mengalir, semua akan selalu penulis ingat sebagai motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih.

Diri saya

Terima kasih atas semua kerja keras dan perjuanganyang telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

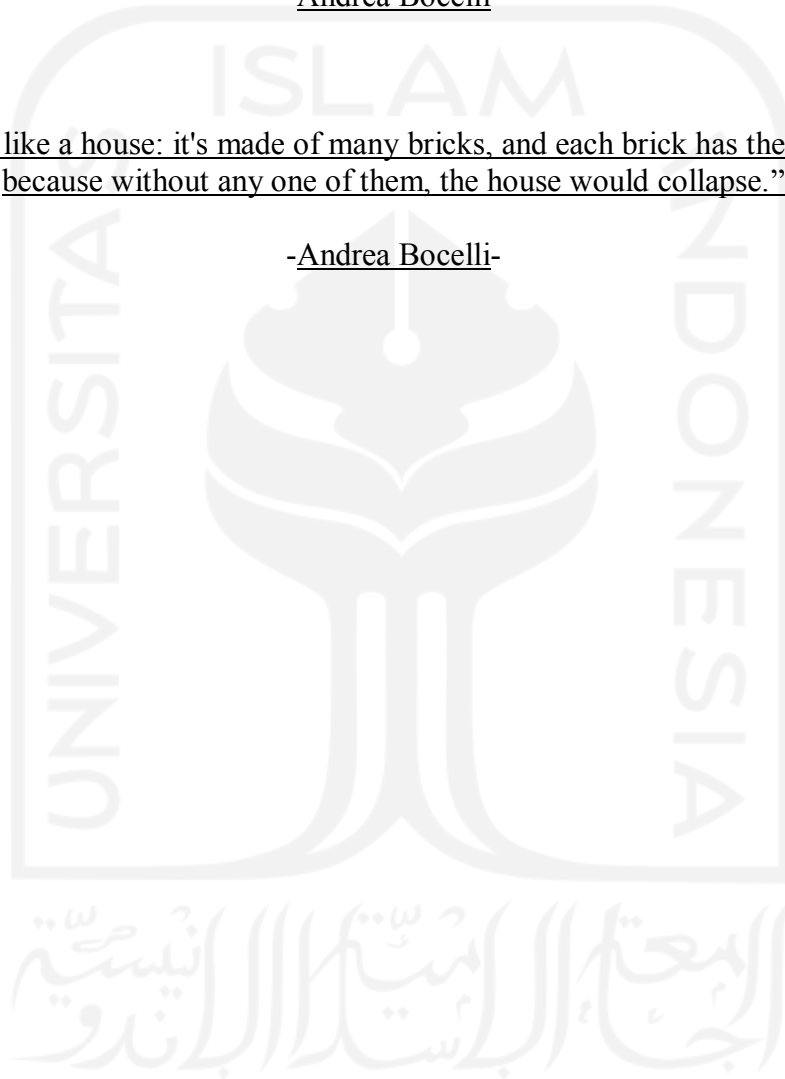
HALAMAN MOTTO

“I have to face life with a newly found passion. I must rediscover the irresistible will to learn, to live and to love.”

-Andrea Bocelli-

“A career is like a house: it's made of many bricks, and each brick has the same value, because without any one of them, the house would collapse.”

-Andrea Bocelli-



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehinggakarya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sebuah rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku peneliti, karena atas rahmat dan hidayah Allah akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah setia mendukung dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku dosen dan Ketua Prodi Hubungan Internasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, saran, solusi hingga waktunya. Tanpa beliau penulis tidak akan menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
5. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional diantaranya Irawan Jati, S.IP.,

M.Hum., M..S.S., Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. dan Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D. terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

6. Mardiatul Khasanah (Mbak Diah) selaku Asisten Prodi Hubungan Internasional. Terima Kasih telah memberikan informasi terkait perkuliahan serta menampung segala pertanyaan dan curahan hati kami.

7. Kedua orang tua Ayahanda Mahmud Samsul Hadi dan Ibunda Meiske Tineke Makahinda terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, semangat dan dukungan baik moral maupun material yang tak pernah berhenti mengalir.

8. Saudari kandung yaitu Neike Pratiwi Hadie Putri yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis.

9. Keluarga Besar IMBARMASKOT diantaranya, Kakung Imam Soehadi (Alm.), Uti Isminih (Alm.), Bude Mudah, Pakde Dar (Alm.), Mas Reza, Mba Nina, Dedek Kay, Mas Bana, Mba Noorma, Dedek Ghazy, Mba Rani, Mas Rafif, Bulik Nur, Dek Ica, Dek Phytra, Dedek Ais, Dedek Bima, Bulik Siti, Om Heru, Dek Zulham, Dek Angga, Om Min, Bulik Diah, Dek Vina, Dek Farah, Om Mamuk, Tante Hany, Dek Sarah, Dek Raufan, Dek Razka, Bulik Lia, Bulik Dewi, Kakung Sahid (Alm.), dan Uti Sahid (Alm.) yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis.

10. Kawan-kawan seperjuangan SMPN 1 Samarinda yaitu Ahyani Rizki Ramadhan dan Muhammad Firman Aprianto atas dukungan dan motivasi kepada penulis.

11. Kawan-kawan seperjuangan STONE TBK diantaranya, MuhammadTsalis Fitroni, Ahmad Nur Muharram, Adi Winata, Norhadi, Kaharudin Putra, Sayyid Haidar Ali Al-

Hamid, Muhammad Reja Rizqi Pahlawan, Yogo Pratomo, M. Fuad Wiyono Putra, Farizki Ridho Anthana, Aji Dova Panji Pratama, Ananda Bagus Budi Hartono, Ravael Eldad Pongtuluran, dan Muhammad Daffa Fakhurroji yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

12. Kawan-kawan seperjuangan Delmises Squad diantaranya, Dessyana Idzni, Mega Silviana Dewi, Vivin Farchianingsih, Muhammad Tsalis Fitrono, Muhammad Reja Rizqi Pahlawan, Muhammad Daffa Fakhurroji, dan Sayyid Haidar Ali Al-Hamid yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

13. Kawan-kawan seperjuangan UGD (Unit Gawat Darurat) diantaranya, Muhammad Tsalis Fitroni, Muhammad Reja Rizqi Pahlawan, dan Muhammad Firman Aprianto yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

14. Kawan-kawan seperjuangan Wanjay Squad diantaranya, Jamal Din Aulia, Aldi Gustiyandi, Bima Putra Manaf, M. Alvin Wirapradhana M, M. Farchan Amsyari W, Rifki Abror Ananda, Faishal Anas Amrullah, Mauludana Afif Pratana, Rangga Rizki Ramadhoan, dan M. Aditya Ezha Angkasawan atas pertemanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan serta motivasi kepada penulis sebagai teman main selama perkuliahan. Tetap percaya slogan kita, yakni “Main Bareng, Wisuda Bareng”.

15. Kawan-kawan seperjuangan HI sekaligus sahabat yaitu Ahmad Turmudzi, Muhammad Izzu Saukani, dan Amirul Advin Mahmud atas dukungan serta motivasi kepada penulis sebagai teman main selama perkuliahan dan teman ngobrol.

16. Teman-teman HI UII 2016 yang telah menemani kegiatan saya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas pertemanan selama masa perkuliahan.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih

untuk dukungan, semangat dan doanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.



DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</i>	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	<i>iv</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i>	<i>v</i>
<i>PRAKATA</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>x</i>
<i>DAFTAR SINGKATAN</i>	<i>xii</i>
<i>Abstrak</i>	<i>xiv</i>
<i>BAB 1 Pendahuluan</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Signifikansi Penelitian	6
1.5. Cakupan Penelitian.....	7
1.6. Tinjauan Pustaka.....	7
1.7. Landasan Teori	14
1.8. Metode Penelitian	18
<i>BAB 2 DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL ANTARA PRANCIS-TURKI SEBELUM ERA EMMANUEL MACRON</i>	<i>20</i>
2.1. Dinamika kebijakan Prancis terhadap keanggotaan Turki Uni Eropa era Jacques Chirac- Francois Hollande.....	21
2.1.1. Kebijakan luar negeri era Jacques Chirac	22
2.1.2. Kebijakan luar negeri era Nicolas Sarkozy	25
2.1.3. Kebijakan luar negeri era Francois Hollande	30
<i>BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PADA MASA KEPEMIMPINAN EMMAUEL MACRON</i>	<i>34</i>
3.1. Kepentingan Prancis di Uni Eropa	34
3.2. Kebijakan Luar Negeri Era Emmanuel Macron.....	37
3.3. Respon Pemerintah Emmanuel Macron Terhadap Perkembangan di Turki dan di Prancis.....	41

3.4. Analisis Penolakan Pemerintah Emmanuel Macron	50
3.4.1. Speech Act Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE.....	53
3.4.2. Deeds Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE.....	56
3.4.3. Rules Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE.....	61
<i>BAB 4 PENUTUP</i>.....	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	68
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>.....	69



DAFTAR SINGKATAN

UE: Uni Eropa

AKP: *Adalet ve Kalkinma Partisi*

NATO: *North Atlantic Treaty Organization*

EDI: *European Data Incubator*

UMP: *Union pour un mouvement populaire*

KTT: Konferensi Tingkat Tinggi

FEDIF: *Federation des Entreprenneur Franco-Turcs*

IFOP: *institut francais d'opinion publique*

ECSC: *European Coal and Steel Community*

EEC: *European Economic Community*

Euratom: *The European Atomic Energy Community*

IPA: *Instrument for Pre-Accession Assistance*

HAM: Hak Asasi Manusia

ECtHR: *European Court of Human Right*

ISIS: *Islamic State of Iraq and The Levant*

SDF: *Syrian Democratic Forces*

YPG: *Yekîneyên Parastina Gel*

PKK: *Partiya Karkerên Kurdistanê*

PDP: *Plateforme de Paris pour le Dialogue Interculturel*

OHAL: *Olağanüstü Hal*

KHK: *Kanun Hükmünde Kararname*

HDP: *Halkların Demokratik Partisi*

AQMI: *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb*

MUJAO: *Monotheism and Jihad Movement in West Africa*

MENA: *Middle East and North Africa*

MHP: *Milliyetçi Hareket Partisi*

FETO: *Fethullahist Terrorist Organisation*



Abstrak

Dalam proses negosiasi untuk bergabung ke Uni Eropa, setiap negara harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh kelompok. Setiap masa pemerintahan memiliki pendapat yang berbeda, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Dimulai dari Presiden Jacques Chirac mendukung Turki bergabung ke Uni Eropa, Nicolas Sarkozy menentang Turki ke UE, dan Francois Hollande mendukung Turki ke UE. Sementara itu, hubungan bilateral antara Prancis-Turki juga mengalami pasang surut. Tidak hanya itu, hubungan kedua negara sempat mengalami ketegangan karena perbedaan argumen, penghinaan kartun Nabi Muhammad SAW., masalah islamophobia, dan perbedaan pandangan terkait pemberantasan terorisme. Sehingga, pada era kepemimpinan Emmanuel Macron, Prancis tetap menolak Turki bergabung ke UE karena Turki belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Prancis tetap menolak Turki bergabung ke Uni Eropa menggunakan teori Konstruktivisme yang digagas oleh Nicholas Greenwood Onuf. Dalam penelitian ini, penulis menemukan tiga variabel yang melatarbelakangi Prancis menolak Turki ke UE. Yang pertama adalah Speech Act berdasarkan statemen yang diucapkan oleh presiden Prancis Emmanuel Macron,. Yang kedua adalah Deeds yang didasari atas tindakan Prancis dari kebijakan luar negeri Prancis. Dan yang terakhir adalah Rules yang didasari oleh hubungan kerjasama antara Prancis dan Turki pasca hubungan kedua negara renggang.

Kata Kunci: Prancis, Penolakan Turki ke UE, Teori Konstruktivisme, *Speech Act*, *Deeds*, *Rules*

Abstract

In the process of negotiating to join the European Union, each country must meet the conditions that have been made by the group. Each period of government has a different opinion, some are for and some are against. Starting from President Jacques Chirac supporting Turkey to join the European Union, Nicolas Sarkozy against Turkey to the EU, and Francois Hollande supporting Turkey to the EU. Meanwhile, bilateral relations between France and Turkey also experienced ups and downs. Not only that, the relations between the two countries experienced tensions due to differences in arguments, insults to cartoons of the Prophet Muhammad, Islamophobia, and different views regarding the eradication of terrorism. Thus, in the era of Emmanuel Macron's leadership, France still refused Turkey to join the EU because Turkey had not met the requirements set by the EU. This study aims to analyze the reasons for France still refusing Turkey to join the European Union using the theory of Constructivism initiated by Nicholas Greenwood Onuf. In this study, the authors found three variables behind France's rejection of Turkey to the EU. The first is the Speech Act, based on a statement by French President Emmanuel Macron. The second is Deeds which is based on French actions from French foreign policy. And the last one is the Rules which are based on the cooperative relationship between France and Turkey after the relations between the two countries were tenuous.

Keywords: France, Turkey's Rejection to the EU, Constructivism Theory, Speech Act, Deeds, Rules

BAB 1

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Pada tahun 1987, Turki mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Untuk mendukung dan mewujudkan keinginan tersebut, Turki berupaya untuk mengeluarkan Paket Harmonisasi sebagai bagian dari reformasi untuk mencapai kriteria Kopenhagen. Reformasi tersebut menargetkan pada perundang-undang yang tidak sesuai dengan standar Uni Eropa. Melalui paket ini, Turki melakukan berbagai amandemen pada sejumlah area seperti kebebasan berekspresi, menghapuskan hukuman, kesetaraan gender, dan sebagainya. Turki juga mengklaim bahwa paket harmonisasi telah memberikan dampak yang revolusioner bagi kehidupan di Turki diantaranya dengan perbaikan Hak Asasi Manusia, penguatan perlindungan terhadap tindak kekerasan, memperluas kebebasan berekspresi dan kebebasan media, mengembangkan hak-hak kultural, memperkuat kesetaraan gender dan konsolidasi demokrasi. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa dengan menerapkan sejumlah paket harmonisasi ini, Turki saat ini menjadi lebih bebas, stabil dan bermanfaat dibandingkan sebelum Desember 1999. Di bawah kepemimpinan Erdogan, ekonomi Turki telah menjadi ekonomi terbesar ke-17 di dunia, Sepuluh tahun kepemimpinan partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) juga telah membuat Turki lebih demokratis (rahim, 2013).

Respon Prancis terhadap Turki bergabung Uni Eropa, mulai dari Valery Giscard d'Estaing sebagai orang pertama yang menolak Turki bergabung ke Uni Eropa.

Selanjutnya ada Jacques Chirac, dimana Chirac mendukung penuh Turki bergabung dengan Uni Eropa. Beberapa partai seperti partai Nasionalis sayap kanan dan centris menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa, sementara partai-partai sayap kiri dan sayap kanan terlihat lebih terbagi. Partai Komunis Prancis dan *The Greens* mendukung Turki bergabung ke Uni Eropa dalam kerangka persyaratan yang ditetapkan oleh kriteria Kopenhagen (Sait Akşit, 2010). Beberapa negara kawasan Eropa memperdebatkan mengenai Turki bergabung ke Uni Eropa, mereka juga melihat beberapa persyaratan yang sudah terpenuhi oleh Turki dan ada juga beberapa yang tidak memenuhi syarat, kemudian Sarkozy saat menjabat sebagai presiden tahun 2007 menegaskan bahwa Sarkozy menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut memicu protes terhadap Turki, atas penolakan tersebut sehingga perlu dilakukan diskusi dalam forum. Prancis menantang Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa (Jones, 2011).

Sarkozy menerapkan kebijakan memperketat keamanan dan memberikan pembatasan bagi imigran yang berkunjung maupun mencari tempat tinggal. Ada lima pilar kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Sarkozy, yaitu Geopolitik, Ekonomi, politik, sistem internasional, identitas dan budaya. Sarkozy berupaya untuk membangkitkan kembali Prancis dalam politik global dengan menjadikan posisi Prancis sebagai kunci utama di Uni Eropa. Ada beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Sarkozy, yaitu melakukan kerjasama dengan Uni Eropa untuk menang persetujuan dari perjanjian Lisbon. Kerjasama dengan Libya untuk membebaskan perawat Bulgaria yang ditawan di Libya, melakukan perjanjian keamanan, memperbaiki hubungan bilateral dengan Jerman. Selain itu, Sarkozy juga melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama dengan berbagai presiden dunia (Mulyani, 2017).

Francois de Hollande merupakan Presiden ke-24 setelah Sarkozy, Hollande berasal dari partai Sosialis Prancis. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Presiden dewan umum Corrèze. Ada beberapa kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Hollande, yaitu menciptakan perdamaian dan stabilitas, wali kemerdekaan, sekutu independen, Motor integrasi Eropa - kepemimpinan Prancis-Jerman, Eropa sebagai kekuatan, dan Pendukung arsitektur Eropa baru (Rein, 2016, hal. 27-35). Partai sosialis Prancis mengungkapkan akan memberikan dukungan ke Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa. Sejak Hollande menjadi Presiden, Prancis telah melepas blokade dari 5 interval proses negosiasi Turki-Uni Eropa. Hollande memperkenalkan berbagai orientasi politik dalam dan luar negeri untuk memperbaiki dan menyempurnakan rezim sebelumnya, yaitu, mengurangi defisit anggaran negara serta berusaha mempertahankan model sosialisme Prancis, berupaya memajukan para generasi muda Prancis untuk mewujudkan keadilan di negaranya, berusaha membuat elemen pertumbuhan ekonomi negara untuk bisa masuk dalam pakta anggaran Eropa. Kemudian, dalam bidang kebijakan luar negeri, Hollande berusaha mewujudkan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam hegemoni negara sekutu, Amerika Serikat dan Uni Eropa khususnya Inggris dan Jerman. Selain itu, Prancis juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara dunia, seperti Iran, Qatar, Lebanon, dan Suriah. Prancis juga berupaya untuk mempertahankan negaranya sebagai kekuatan menengah yang berusaha untuk mencapai kemampuan pertahanan global. Prancis berupaya untuk mempertahankan mekanisme bilateral dan multilateralisme di tingkat dunia dengan kekhasan seperti promosi Hak Asasi Manusia dan penekanan pada kebijakan kebudayaan.

Emmanuel Macron merupakan Presiden Prancis ke-25, Macron mengalahkan Li Pien dalam pemilu Prancis tahun 2017. Kebijakan-kebijakan luar negeri oleh Macron yaitu diplomasi, dimana Prancis akan memainkan peran penuh dalam melakukan

diplomasi. Pada bulan Agustus tahun 2017, Prancis akan fokus pada empat prioritas, yakni keamanan, kemerdekaan, solidaritas, dan pengaruh. Keempat prioritas ini akan melanjutkan diplomasi pada tahun 2018. Selanjutnya ada terorisme, dimana banyak kejadian terorisme di berbagai negara, salah satunya adalah Prancis. Perang yang terjadi di Iraq dan Afghanistan. Prancis berupaya untuk memberikan perdamaian di Iraq dan Suriah. Prancis akan melakukan diplomasi, yang pertama di Iraq dan kedua di Suriah. Pada bidang pendidikan, Prancis berupaya untuk mengurangi terjadinya terorisme, pemikiran ekstremisme. Prancis akan memberikan pendidikan untuk perempuan dalam kebijakan kerjasama yang akan diterapkan Prancis di masa mendatang. Kemudian, migrasi, dimana Prancis melakukan kebijakan kemitraan dengan beberapa negara Afrika, yaitu Republik Niger dan Republik Chad. Prancis mengembangkan kerja sama antarkedua negara dengan menyediakan sumber daya, membantu para pengungsi dari Afrika yang tidak memiliki kesempatan untuk menerima status pengungsi untuk kembali ke negara asal, kemitraan erat yang sudah terjalin, dan membantu para pengungsi untuk tidak berada di kamp dan bahaya di Libya. (Embassy, 2018).

Hubungan antara Prancis dan Turki setelah Perang Suriah 2011, dimana kedua negara melakukan kerja sama untuk menyelesaikan konflik Suriah. Macron dan Erdogan membahas melalui telepon tentang Operasi Turki terutama pada milisi unit perlindungan Rakyat Kurdi di Suriah. Macron marah pada para pejabat Turki pekan lalu dengan mengatakan pada wawancara surat kabar bahwa Prancis akan memiliki masalah nyata dengan kampanye tersebut apabila ternyata adalah operasi invasi. Kantor berita yang dikelola oleh Pemerintah Turki Anadolu Ajansi yang dikelola oleh pemerintah melaporkan Sabtu bahwa Erdogan telah berupaya untuk yakinkan Macron selama pembicaraan mereka, mengatakan bahwa Ankara tidak memperhatikan wilayah Suriah. Kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama pada peta jalan diplomatik

untuk Suriah dalam beberapa minggu mendatang. Pihak Istana Presiden Elysee mengatakan bahwa diskusi antara Prancis dan Turki berharap adanya solusi politik yang diawasi oleh PBB akan meningkat dalam beberapa hari mendatang (Fr, 2018).

Pada tahun 2020, hubungan bilateral antara Prancis-Turki renggang karena Prancis telah menghina karikatur Nabi Muhammad SAW., kemudian mendapat kritikan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan mengatakan kepada Macron bahwa Macron membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental atas dasar mempertahankan nilai-nilai sekuler dan melawan Islam radikal (BBC, BBC, 2020). Ketegangan hubungan Prancis dan Turki semakin meningkat, ketika Presiden Turki Erdogan memboikot produk-produk Prancis dan mengecam keras terhadap seruan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk “Islam Prancis”. Sebuah majalah bernama Charlie Hebdo mencetak majalah terbaru dengan menampilkan karikatur Erdogan yang memakai pakaian dalam, kemudian, mengangkat rok wanita Muslim. Presiden Turki Erdogan tidak melihat karikatur tersebut, namun mengutuk majalah tersebut karena telah menghina Presiden Turki Erdogan (Ing, 2020).

Macron mengungkapkan bahwa Turki akan dijadikan sebagai mitra ekonomi, dan tidak mendukung Turki bergabung dengan Uni Eropa. Presiden Turki Erdogan berada di Paris untuk melakukan pembicaraan kepada Macron, bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan pemerintahnya yang tidak baik dengan Eropa. Macron menyatakan bahwa proses Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih jauh dan disarankan menjadi kemitraan sebagai gantinya. Macron mengatakan proses saat ini tidak memungkinkan untuk hasil di tahun-tahun mendatang (WIRES, 2018).

Hubungan Prancis-Turki di bawah kepemimpinan presiden Emmanuel Macron dan Recep Tayyip Erdogan mengalami pasang surut dan ketegangan antar kedua negara, hal tersebut terkait kondisi dari masing-masing negara baik dari Prancis maupun Turki.

Bahkan kedua presiden saling adu argumen hingga viral di media internasional. Ada beberapa hal yang membuat hubungan bilateral kedua semakin tegang antara lain adalah masalah Islamophobia, perbedaan pandangan terkait pemberantasan terorisme, ISIS, dan pasukan Kurdi di Suriah dan terakhir masalah penghinaan kartun Nabi Muhammad SAW., oleh seorang guru di depan kelas di Prancis, sehingga membuat kebijakan luar negeri Prancis era Emmanuel Macron tetap menolak Turki bergabung ke Uni Eropa.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai faktor apa yang membuat Prancis tetap menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa serta kebijakan luar negeri apa saja yang dibuat oleh Macron serta dampak hal tersebut bagi hubungan bilateral antara Prancis dan Turki.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibahas, rumusan masalah kali ini yaitu **“Mengapa Prancis masih menolak keanggotaan Turki di Uni Eropa pada era kepemimpinan Emmanuel Macron?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui alasan mengapa Prancis menolak Turki bergabung Uni Eropa.”

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting karena adanya penolakan dari Prancis yang konsisten mengenai keanggotaan Turki sebagai anggota tetap Uni Eropa, meskipun terdapat perbedaan ideologi politik dari setiap presiden, dimana Macron di sayap kanan tengah sedangkan Erdogan di sayap kiri. Selain itu, Prancis bisa dikatakan memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Eropa dan suara penting dalam perpolitikan di

Eropa, dimana Prancis selalu mendukung *common foreign and security policy* yang bersifat pro-aktif dan berpengaruh untuk menjadikan Uni Eropa sebagai aktor global yang berpengaruh. Penelitian ini akan melihat adanya faktor-faktor mengapa Prancis menolak Turki bergabung Uni Eropa dan menjelaskan kebijakan-kebijakan luar negeri Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Pembahasan tentang topik ini berbeda dikarenakan penelitian lain banyak yang berfokus tentang pembahasan pada masa kepemimpinan sebelumnya yaitu Nicholas Sarkozy, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus dalam membahas tentang kepemimpinan pada masa Emanuel Macron.

1.5. Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, cakupan penelitian membahas mengenai penolakan Prancis terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa dan kebijakan-kebijakan Prancis di Era Emmanuel Macron. Penelitian ini akan mencakup jangka waktu dari tahun 2017 sampai 2019. Alasan mengambil tahun 2017-2019 karena Emmanuel Macron menjabat sebagai Presiden Prancis mulai pada tanggal 14 Mei 2017 dan penelitian ini akan menganalisis mengapa Prancis masih menolak Turki bergabung ke Uni Eropa. Penulis juga menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Macron sehingga menolak Turki menjadi anggota Uni Eropa.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan mengenai analisis kebijakan Prancis terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa Era Emmanuel Macron dikutip dari *Ending a Decade or Errors (2001-2011)? Past, Present, and Prospects of the Franco-Turkish Relations* karya Maxime Gauin, jurnal ini menjelaskan awal mula hubungan bilateral antara Prancis dan Turki, dimana kedua negara memulai hubungan tahun 1536 dan Prancis membuat kantor Kedutaan Besar di era Dinasti Ottoman dan di Republik Turki. Setelah kapitulasi kedua (1569),

Prancis pertama kali menempati di Dinasti Ottoman untuk investasi, kepentingan ekonomi, dan sekolah, budaya dan literatur Prancis ada selama reformasi Dinasti Ottoman. Pada tahun 1923, Prancis dan Turki sudah menjadi status sebagai negara republik dan setelah Lausanne treaty, masalah terakhir isu yang terjadi pada perjanjian persahabatan pada tahun 1926 dan diterima pada tahun 1928 ke utang Ottoman. Kelompok revolusi Kemalist sangat apresiasi terhadap Prancis dan kaum komunis memuji negara pertama yang menandatangani perjanjian dengan USSR. Kaum sosialis puas dengan kemajuan dalam pendidikan populer. Hak pusat dan kaum konservatif sangat menghargai patriotisme dan modernisasi teknis negara. Pada tahun 1974 setelah pemilu, Valery Giscard d'Estaing terpilih sebagai Presiden Prancis dan menggantikan Gaullist George Pompidou. Beberapa aktivis seperti Marc d'Anna seorang mantan aktivis dari radikal, yang menjadi anti Islam propaganda, dan mengatur penulisan di distribusi koran. Beberapa tokoh lainnya juga menolak adanya Turki bergabung dengan Uni Eropa.

Jurnal ini menjelaskan tentang hubungan bilateral antara Prancis dan Turki yang dimulai pada tahun 1536 dan sempat mengalami konflik dan kemudian menjadi mitra perdagangan bagi kedua negara. Tahun 1926, Kedua negara menandatangani perjanjian Lausanne sebagai bentuk hubungan bilateral kedua negara. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana problematika hubungan bilateral yang terjadi antara Prancis dan Turki. Beberapa sub bab juga menjelaskan tentang isu genosida di Armenia antara Prancis dan Turki di masa lalu. Jurnal tersebut juga menjelaskan tentang adanya pendapat Sarkozy tentang Turki ingin masuk ke UE sehingga Sarkozy menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa sehingga beberapa aktivis dan tokoh-tokoh lainnya tidak sepenuhnya mendukung Turki bergabung dengan Uni Eropa (Gauin, 2012).

Jurnal selanjutnya yaitu, *The Historical Background and The Present State of Turkish-French Relation* karya Davut Han Aslan, membahas tentang hubungan bilateral antara Prancis dan Turki dimana dimulai pada tahun 1536 pada masa aliansi Francois 1 dan Suleyman *The Magnificent*, yaitu Ankara dan Paris. Sejak 1935, kedua negara melanjutkan hubungan bilateral yang harmonis. Prancis dan Turki mengalami tiga kali dalam kondisi perang. Pertama, abad ke-18 sekitar tahun 1798-1800 ketika kampanye Napoleon ke Mesir dan Suriah, kedua konfrontasi yang terjadi selama Perang Dunia pertama, khususnya pada kampanye Gallipoli, ketiga ketika perang Turki dari kemerdekaan atau disebut sebagai Perang Cilicia atau Perang Prancis-Turki tahun 1920-1921. pada bidang ekonomi, hubungan ekonomi memainkan peran penting pada kedua negara. Kerjasama yang erat antara kedua negara bidang ekonomi dan perdagangan memberikan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat. Kedua negara memiliki ekonomi yang terbilang stabil dan juga ekspor Prancis ke Turki meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Ada sekitar empat ratus perusahaan Prancis yang beroperasi di Turki, yang mempekerjakan sekitar seratus ribu orang. Pada bidang politik, Prancis dan Turki memiliki kerjasama yang nyata. Dalam aliansi NATO, kedua negara mengambil bagian dalam misi di Afghanistan dan Balkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri Turki berkembang secara signifikan dan terbuka luas di berbagai bidang untuk kerjasama.

Jurnal ini membahas tentang awal mula sejarah hubungan bilateral antara Prancis dan Turki. Davut memaparkan tentang awal mula hubungan bilateral antara kedua negara hingga lika-liku hubungan bilateral pada abad ke-20. Selain itu, Davut menjelaskan tentang aspek ekonomi dari Prancis dan Turki, dimana kedua negara melakukan kerjasama ekonomi dan bidang politik, sehingga hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Selain itu, Davut memaparkan tantangan dan prospek Turki ke

Uni Eropa, sedangkan isu terkini mengenai hubungan antara Turki dan Prancis, dimana Prancis memiliki oposisi kuat kepada aspirasi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Jurnal ini hanya menjelaskan tentang hubungan bilateral kedua negara serta tantangan dan prospek dari hubungan kedua negara, tidak memasukkan kebijakan-kebijakan luar negeri (Aslan, 2014).

Ketiga adalah *The European Union's refugee crisis and rising functionalism in EU- Turkey Relations* karya Beken Saatçioğlu, dimana Uni Eropa menjalin hubungan bilateral dengan Turki. Turki adalah mitra strategi dan kerjasama bagi Uni Eropa selama terjadinya krisis pengungsi dan banyak terjadi masalah di berbagai bidang, seperti keamanan, perdagangan dan energi. Selain itu, keanggotaan Turki di Uni Eropa sangat dipolitisasi. Pada survei opini publik tahun 2017, negara anggota Uni Eropa memilih oposisi sebanyak 77 persen, sedangkan 7 persen dukungan untuk masuk Uni Eropa tahun 2018 yang dilakukan oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri. Setelah krisis pengungsi, Uni Eropa akan prioritaskan untuk mempertahankan hubungan kerja sama fungsional dengan Turki daripada menerapkan berbagai persyaratan secara tegas pada saat demokrasi Turki membutuhkan daya tarik dari instrumen inti 'kekuatan transformatif' Uni Eropa. Adanya tiga kondisi tersebut yakni saling ketergantungan, adanya politisasi keanggotaan Turki di Uni Eropa dan beberapa persyaratan yang tidak konsisten meningkat adanya kemungkinan hubungan Uni Eropa-Turki yang fungsional daripada berorientasi keanggotaan. Akan tetapi, pembentukan EDI (European Data Incubator) belum pasti karena kondisi terakhir yang dihipotesiskan pada politisasi EDI di Turki. Di Turki, keanggotaan Uni Eropa tidak cukup dipolitisasi karena masih ada dukungan publik untuk itu walaupun tingkat dukungannya terkadang tidak stabil karena dipicu oleh pergeseran perkembangan

politik antara Turki dan Uni Eropa serta negara-negara anggota Uni Eropa. Selain itu, mayoritas publik sekitar 70 persen menentang segala bentuk hubungan antara Uni Eropa-Turki selain keanggotaan. Akibatnya, untuk menjalin hubungan EDI antara Uni Eropa-Turki perlu adanya tantangan kelembagaan dan politik terkait perlu diatasi.

Jurnal ini membahas mengenai hubungan antara Uni Eropa-Turki, dimana kelompok regional dan negara melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan pengungsi. Beken menjelaskan bagaimana hubungan antara Uni Eropa dengan Turki berlangsung, selain itu juga adanya peristiwa membludaknya pengungsi membuat hubungan Uni Eropa-Turki mengalami masalah. Ada 3 kondisi yang terjadi antara Uni Eropa dan Turki, di antaranya adalah adanya saling ketergantungan, adanya politisasi keanggotaan Turki di Uni Eropa, dan persyaratan yang tidak konsisten. Ketiga inilah yang membuat hubungan Uni Eropa dan Turki tidak stabil, sehingga memungkinkan hubungan Uni Eropa-Turki yang bersifat fungsional dan tidak berorientasikan keanggotaan. Hampir sebagian besar negara anggota Uni Eropa menolak Turki bergabung ke UE, dan beberapa negara mendukung Turki bergabung dengan Uni Eropa (Saatcioglu, 2019).

Keempat yaitu *Slamming the Sublime Porte? Challenges in French-Turkish Relations from Chirac to Sarkozy* karya Justin Vaisse, membahas tentang tantangan hubungan Prancis dan Turki dari Chirac ke Sarkozy. Pembahasan pertama yaitu mengapa Prancis tidak mau Turki di Uni Eropa? Pada diagram tabel, dari pertanyaan *do you think that Turkey should be invited to join the EU?*, Prancis menjawab ada sekitar 71 persen menjawab tidak, 16 persen menjawab iya, dan 13 persen menjawab tidak yakin. Ada 3 penolakan Sarkozy terhadap Turki bergabung ke UE, yaitu pada bidang geografi, Sarkozy berpendapat bahwa wilayah Turki tidak berada di kawasan Eropa, dan berada di tengah Asia Minor, apabila Turki diterima masuk Uni Eropa

menjadi tanda tanya, ungkap Sarkozy, bagaimana orang bisa membenarkan mencegah negara sendiri seperti Maroko bergabung?. Kedua kepentingan kekuasaan Eropa, Sarkozy mendeskripsikan dirinya sebagai pendukung dari kekuasaan Uni Eropa, Sarkozy ingin menjadi bagian dalam dunia dan akan menjadi pengambilan keputusan. Ketiga, nilai, budaya, dan agama, ketika Sarkozy menolak karena adanya Islam, dimana Ipraslami sebagai peran di visi dan misinya. Dalam kampanye Pilpres tahun 2006-2007, Sarkozy mengumumkan akan mengakhiri proses negosiasi Turki masuk ke UE dan reorientasi hubungan Turki-Uni Eropa ke kerjasama strategis, dimana partisipasi di sektor perdagangan, kebijakan Uni Eropa seperti pendidikan, keamanan, dan perdagangan. Strategi ini bisa diperluas ke negara lain seperti Ukraina atau Georgia. Sarkozy mengatakan akan memberikan kesempatan yang akan datang bagi yang mau membuka negosiasi. Selain itu, Sarkozy juga berharap hubungan Prancis dan Turki tetap harmonis dan menjadi hubungan spesial di masa mendatang.

Jurnal ini menjelaskan bagaimana tantangan hubungan kedua negara dari Chirac ke Sarkozy, dimana sebelum Sarkozy menjadi presiden, Sarkozy menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu, ada 3 faktor utama Sarkozy menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa, yaitu geografi, kepentingan kekuasaan Eropa, dan agama, budaya, dan nilai. Sarkozy menjelaskan alasan mengapa Sarkozy tetap menolak Turki bergabung ke UE setelah menjadi presiden Prancis. Sarkozy memaparkan tentang responnya terhadap Turki sehingga ia menolak dan mengakhiri negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Jurnal ini juga memaparkan data statistik mengenai Turki bergabung ke Uni Eropa. Jurnal ini tidak menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan luar negeri Prancis Era Sarkozy, karena Sarkozy baru menjabat sebagai Presiden tahun 2007 (Vaisse, 2008).

Terakhir adalah *France View of Turkey-EU Relations in the period of Francois Hollande: Go Where Fast* karya Ekrem Yaşar AKÇAY, dalam jurnal ini membahas secara umum tentang hubungan bilateral antara Prancis dan Turki dan perspektif Prancis terhadap keanggotaan Turki ke Uni Eropa pada era Hollande. Sejak Hollande menjadi Presiden Prancis pada tahun 2012, Hollande dan Abdullah Gul bertemu pada saat pertemuan NATO di Chicago. Gul menanyakan kepada Hollande mengenai hubungan bilateral kedua negara dan Gul mengatakan bahwa Hollande mengenal Turki lebih baik dari Sarkozy dan Turki sangat dekat mengikuti perekonomian sehingga Hollande menyatakan untuk mengambil langkah utama untuk memberikan keputusan yang positif. Kemudian, Hollande bertemu dengan Erdogan di Rio de Janeiro dan sepakat tentang perlunya membuka lembaran baru antara kedua negara dan Erdogan mengundang Hollande untuk ke Turki. Lalu, menteri luar negeri Turki Ahmet Davutoglu pergi ke Prancis untuk bertemu Menteri Luar Negeri Laurent Fabius. Hollande kembali berkunjung ke Turki pada tanggal 27 hingga 2 Januari 2014 untuk perkembangan hubungan bilateral kedua negara, ada 13 kesepakatan yang telah ditandatangani dan mencapai dimensi baru dengan menandatangani kerjasama yaitu deklarasi politik bersama tentang pembentukan kerangka kerja strategi. Rencana aksi untuk implementasi dari deklarasi antara Prancis dan Turki dimulai dari beberapa bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya seperti contoh pembangunan nuklir di Sinop, Turki, yang diberikan ke perusahaan Jepang dan Prancis. Namun, ketika memeriksa hubungan ekonomi antara Prancis dan Turki di bawah kepemimpinan Hollande terlihat bahwa Turki merupakan pasar ekspor Prancis di luar Uni Eropa. Berdasarkan data tahun 2016, Prancis mendapatkan peringkat enam dari beberapa negara ekspor dan impor. Partai sosialis Prancis memberikan dukungan penuh kepada Turki dalam proses keanggotaan penuh Uni Eropa. Berdasarkan Partai Sosialis jika

turki memenuhi kriteria kopenhagen, maka Turki akan menjadi anggota penuh Uni Eropa. Sipapun yang menolak Turki masuk ke Uni Eropa selalu kesulitan pada proses reformasi sejak berakhirnya negosiasi.

Dalam jurnal ini menjelaskan hubungan bilateral antara Prancis dan Turki di masa pemerintahan Hollande, dimana Hollande menjabat sebagai presiden yang menggantikan Sarkozy. Kemudian, Hollande bertemu dengan presiden Turki untuk membicarakan tentang hubungan kedua negara. Kedua negara sepakat untuk bertemu untuk membahas mengenai kerjasama kedua negara. Tulisan jurnal ini menjelaskan beberapa pertemuan antara Prancis dan Turki dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta melakukan penandatanganan tiga belas perjanjian.

Selain itu, Ekrem menjelaskan adanya 3 isu yang berdampak hubungan bilateral antara Prancis dan Turki, yaitu kasus genosida Armenia yang sampai sekarang belum selesai. Kemudian, masalah organisasi terorisme Kurdish yang terjadi di Turki yang mempengaruhi proses Turki bergabung dengan Uni Eropa. Terakhir adanya perselisihan kedua partai karena kurangnya demokrasi di Turki. Selain itu, perspektif Prancis terhadap Turki masuk ke UE, mereka mendukung penuh untuk bergabung dengan uni eropa apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibuat oleh Uni Eropa (AKCAY, 2018).

1.7. Landasan Teori

Penulis akan menganalisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dengan menggunakan teori *Constructivism* yang dikemukakan oleh Nicholas Greenwood Onuf. *Constructivism* merupakan sebuah teori dimana adanya hubungan sosial yang menjadikan manusia mengkonstruksikan menjadi makhluk sosial, kemudian adanya tindakan dan perkataan, misalnya kita menggunakan bahan mentah alam untuk menjadi

sebuah barang jadi, seperti contoh, sebuah kayu yang berada di alam, kemudian dijadikan sebagai benda seperti meja, kursi, pintu, dsb. Konstruktivisme didasarkan pada gagasan bahwa individu dan masyarakat saling berhubungan dalam dua arah yang berkelanjutan. Tindakan, berupa tutur kata dan perbuatan fisik, serta membuat dunia seperti apa yang diinginkan. Supaya tindakan dapat membuat realitas, mereka harus memiliki sebuah makna. Menurut Onuf, makna dalam hubungan sosial manusia sangat bergantung adanya aturan. Dengan demikian Konstruktivisme menegaskan pentingnya aturan fundamental untuk realitas sosial dan konsekuensinya untuk teori sosial konstruktivis (Tim dunne, 2007).

Menurut Onuf, *Constructivism* memiliki tiga variabel, diantaranya adalah *Speech Act*, *Deeds*, dan *rules*. Dasar pemikiran Onuf menyatakan bahwa manusia membangun realita berdasarkan *Deeds*, *Deeds* terdiri dari tindakan nyata atau mengucapkan dengan kata-kata. *Deeds* membentuk realitas sosial karena mereka menciptakan makna. Setelah membangun sebuah realita yang dilakukan berulang kali, maka *Rules* dibentuk menjadi sebuah konteks dan dasar untuk memaknai perilaku manusia. (Zehfuss, *Words and world: onuf's constructivism and German military involvent abroad*, 2004, hal. 151-152).

Constructivism berpegangan bahwa individu membentuk masyarakat, dan masyarakat membentuk individu. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus, dua arah yang saling mempengaruhi, untuk mempelajari ini semua harus ada penengah antara individu dan masyarakat berupa elemen ketiga yakni *Rules*. *Social rules* yang membuat proses antara individu dan masyarakat secara berkelanjutan dan saling mempengaruhi (timbang balik). *Rules* merupakan pernyataan yang menjelaskan kepada objek *what we should do*. *What* merujuk kepada standar perilaku apa yang harus dilakukan. Kemudian, *should* merujuk kepada objek untuk melakukan hal yang menjadi

standar pelaksanaan, apabila mampu dan berhasil melakukan sesuai apa yang diminta maka akan mendapatkan hadiah, tetapi jika tidak melakukannya maka akan diberi hukuman. Inilah yang disebut sebagai konsekuensi dari *rules*. (Onuf, 1998, hal. 59)

Rules akan memberikan pilihan kepada individu yang terlibat di dalamnya. Pilihan mendasar adalah: mengikuti atau tidak mengikuti *rules*. *Rules* menjadi petunjuk bagi sikap individu sehingga memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama mengenai beberapa hal. Dalam proses menentukan pilihan, *rules* memberikan kesempatan kepada individu untuk mempengaruhi *rules*, karena individu memilih untuk mengikuti *rules*, individu akan memperkuat *rules* tersebut dan mempengaruhi individu lainnya untuk bergabung, kemudian setiap individu tidak mengikuti *rules*, maka mereka akan mempengaruhi *rules* dengan cara melemahkannya, yang akan membuka peluang munculnya sebuah *rules* baru. *Rules* merupakan kunci utama pada pemikiran politik Onuf, menurut Onuf masyarakat politik mempunyai dua ciri-ciri utama, pertama selalu ada *rules* yang membuat perilaku individu menjadi bermakna dan yang kedua adalah *rules* selalu memunculkan adanya ketimpangan-ketimpangan pada individu. (Zehfuss, *Word making the world*, 2004, hal. 152)

Menurut Onuf, *speech act* adalah bentuk performa sosial yang berimbang secara langsung dan memiliki konsekuensi. seperti kata saya (kata kerja yang mendeklarasikan, permintaan, dan menjanjikan) bahwa (proposional konten), karena orang-orang merespon kepada mereka (pembicara) dengan tindakan dan penampilan. Pola antara *speech act* dan respon yang diberikan adalah proses yang membuat pengalaman manusia menjadi bermakna. Secara spesifik, praktek *speech act* menimbulkan aturan yang mempunyai harapan untuk mengubah masa depan yang lebih baik daripada masa lalu (Zehfuss, *Words making the world*, 2004, hal. 153).

Kemudian, Onuf menyebutkan ada tiga jenis dari *speech act*, yaitu *assertive*, *directive*, dan *commissive*. *Assertive* merupakan sebuah pernyataan dimana suatu kepercayaan agen untuk diyakini oleh para penerimanya. Lalu, *directive* merupakan keadaan dimana agen menuntut agar penerima *assertive* dapat melakukannya, terakhir *commissive* merupakan sebuah pernyataan terhadap komitmen agen terhadap tindakan-tindakan yang akan datang. *Assertive* akan menghasilkan rules, kemudian *directive* dan *commissive* berupaya untuk menanamkan rules tersebut kepada penerimanya. (Zehfuss, 2004, hal. 154)

Dengan menggunakan kerangka pemikiran Onuf di atas, penulis berusaha untuk menganalisis bagaimana ketiga variabel yang ada pada kerangka dan bagaimana Prancis mengambil tindakan dengan menyampaikan statement kepada Turki melalui *speech act*, kemudian mengambil keputusan. Selain itu, Macron mengatakan kepada Erdogan bahwa tidak ada peluang bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa pada acara pertemuan konferensi baru di Paris, Macron mengatakan bahwa ada perbedaan Hak Asasi Manusia sejak pembersihan Turki setelah terjadi gagal kudeta tahun 2016. Macron juga berkata bahwa inilah akhir dari kemunafikan yang pura-pura bahwa ada prospek kemajuan dalam pembicaraan keanggotaan Turki dengan Uni Eropa. Macron mengatakan bahwa sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan Turki dan inilah momen untuk melihat opsi pendek untuk keanggotaan penuh Uni Eropa sebagai mitra, yang dijelaskan akan berlabuh kepada masyarakat Turki di Eropa. (Macron tells Erdogan: No chance of Turkey joining EU, 2018)

Kemudian, Presiden Prancis Macron mengatakan bahwa perkembangan politik di Turki secara efektif memblokir tawaran Turki bergabung ke Uni Eropa dan menyarankan “kemitraan” daripada keanggotaan penuh. Pada saat acara konferensi pers yang sulit setelah pembicaraan di Paris, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

mengatakan bahwa masyarakat Turki sudah muak menunggu untuk bergabung dengan Uni Eropa selama setengah abad. Macron mengatakan bahwa untuk hubungan dengan Uni Eropa, sudah jelas bahwa perkembangan dan pilihan terkini tidak memungkinkan adanya kemajuan dalam proses tersebut. Macron juga berharap bisa melakukan dialog damai yang akan memungkinkan untuk membangun hubungan yang sangat penting, baik untuk diri sendiri maupun untuk Negara. (Macron says 'no progress possible' on Turkey EU bid, 2018)

1.8. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode kualitatif, merupakan sebuah Metode ini berfokus pada bagaimana individu maupun kelompok dapat memiliki cara yang berbeda dalam realita. Selain itu, metode kualitatif berfokus pada laporan atau data yang dibuat oleh peneliti. Metode kualitatif juga menggunakan pengumpulan data, baik dari jurnal maupun buku. Metode ini akan mencari sumber-sumber yang valid, seperti buku, jurnal, artikel berita, dan website (Beverly Hancock, 2009).

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan membahas terkait kebijakan-kebijakan luar negeri dari Mitterrand hingga Macron dan respon Prancis terhadap Turki bergabung ke Uni Eropa. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan jurnal, buku, dan tulisan akademik lainnya sebagai sumber resmi.

C. Metode Pengumpulan Data

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu telaah pustaka atau disebut library research dengan menggunakan sumber jurnal yang relevan dan valid sesuai dengan studi kasus yang dibahas. Selain itu, dengan menggunakan tulisan

yang ada akan dapat membantu penulis untuk tentukan sudut pandang dan analisis masalah yang diteliti.

D. Proses Pengumpulan Data

Pada awal penulisan, penulis membahas mengenai sekilas tentang hubungan Prancis dan Turki pada abad ke-20, lalu upaya Turki mendaftarkan diri ke Uni Eropa dan respon Prancis terhadap Turki bergabung ke UE. Setelah itu, dijelaskan beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri setiap presiden dari Mitterrand hingga Macron. Setelah itu, akan dibahas mengenai penolakan Prancis terhadap Turki masuke ke Uni Eropa.



BAB 2

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL ANTARA PRANCIS-TURKI SEBELUM ERA EMMANUEL MACRON

Pada bab ini, sebelum membahas mengenai kebijakan luar negeri Prancis era Macron terhadap keanggotaan Turki Uni Eropa. Maka penting bagi penulis untuk membahas mengenai dinamika hubungan bilateral antara Prancis dan Turki. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai dinamika kebijakan luar negeri Prancis terhadap keanggotaan Turki Uni Eropa. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri yang dibuat oleh beberapa presiden sebelumnya berpengaruh terhadap keputusan Turki bergabung ke Uni Eropa. Prancis dikatakan sebagai salah satu negara penentu keputusan penting dalam Uni Eropa. Lebih lanjut, beberapa presiden Prancis mempunyai keputusan yang berbeda, ada yang mendukung penuh Turki bergabung dengan Uni Eropa dan ada yang menentang Turki bergabung ke Uni Eropa.

Lebih lanjut, bab ini juga menjelaskan gambaran umum mengenai kebijakan luar negeri Prancis pada era sebelum Macron, seperti era Jacques Chirac, Nicholas Sarkozy, dan Francois Hollande, lalu dijelaskan kepentingan Prancis di Uni Eropa. Penulis juga akan membahas mengenai beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri terhadap keanggotaan Turki ke Uni Eropa pada era sebelumnya. Sementara itu, akhir pembahasan akan dijelaskan mengenai kepentingan Prancis di Uni Eropa.

2.1. Dinamika kebijakan Prancis terhadap keanggotaan Turki Uni Eropa era Jacques Chirac- Francois Hollande

Sebelum membahas mengenai kebijakan luar negeri dari para presiden sebelumnya secara jelas, penulis akan membahas tentang beberapa respon Prancis terhadap Turki bergabung ke Uni Eropa. Dimulai dari mantan presiden Prancis Valerie giscard D'estaing yang menentang Turki terhadap keanggotaan UE serta mendukung kemitraan istimewa. Nicholas Sarkozy pada saat itu masih menjabat sebagai pemimpin dari partai *Union pour un mouvement populaire* (UMP) dan calon presiden Prancis pada tahun 2007 yang menjadi lawan paling gigih dari keanggotaan penuh UE. Posisi Prancis juga sangat mempengaruhi karena penolakan perjanjian konstitusional UE dalam referendum 29 Mei 2005. Adanya penolakan perjanjian ini bertujuan untuk mereformasi lembaga-lembaga UE mengingat adanya perluasan dan membentuk jalan integrasi Eropa ke depan, hal tersebut menjadi pukulan berat bagi Presiden Chirac yang menyebabkan Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin mengundurkan diri (Grigoriadis, 2006).

Pada subbab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri dari era Jacques Chirac sampai Francois Hollande sebagaimana tabel di bawah ini.

Nama Presiden	Kebijakan Luar Negeri
Jacques Chirac	-Mendukung Turki bergabung dengan Uni Eropa.
Nicolas Sarkozy	-Menentang Turki bergabung ke Uni Eropa.

	<p>-Membuat proposal berupa <i>Union for Mediterrania</i>.</p> <p>-Memblokir 5 bab negosiasi Turki-UE untuk bergabung ke Uni Eropa.</p>
Francois Hollande	<p>-Memperbaiki hubungan bilateral dengan Turki pasca renggangnya hubungan bilateral era Sarkozy.</p> <p>-Prancis mendukung Turki bergabung ke Uni Eropa dengan membuka kembali 5 bab yang telah diblokir oleh Sarkozy.</p>

2.1.1. Kebijakan luar negeri era Jacques Chirac

Pada masa pemerintahan Jacques Chirac, Kebijakan luar negerinya memiliki peran penting bagi Turki untuk memperoleh status kandidat UE. Pada acara KTT Helsinki tahun 1999 dan 2002 di Kopenhagen, Chirac tetap mendukung penuh Turki bergabung dengan Uni Eropa. Pada saat KTT Brussel tahun 2004, Chirac memberikan tanda-tangan untuk dimulainya perundingan UE-Turki. Chirac tidak berhenti mendukung Turki secara penuh, melainkan Chirac selalu menekankan kepada Turki untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE (Celikel, 2019).

Pada awal kepemimpinan Chirac yaitu pada tahun 1999 merupakan titik balik bagi hubungan antara UE dan Turki tepatnya pada KTT Helsinki di tanggal 10-11 Desember 1999. Pada saat itu, Turki mendapatkan status resmi menjadi negara kandidat UE. Hal tersebut juga merupakan tanggal penting dalam hal Prancis mendukung dan berkontribusi pada keputusan yang diambil dalam konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Helsinki ini. Chirac berpendapat mengenai keputusannya bahwa Turki

mempunyai kapasitas eropa yang bersejarah dan telah dibenarkan untuk memiliki Turki yang bersifat stabil, demokratis, modern yang telah memilih sekularisme sejak 1923 yang terintegrasi dalam UE adalah Untuk kepentingan politik Eropa dan ekonomi Prancis. Sikap baik yang dilakukan oleh Chirac berdampak tak terbantahkan pada keputusan tersebut. Akan tetapi, pendiriannya tidak mendapat persetujuan dari publik Prancis karena mereka tidak tertarik dengan ambisi Turki ke UE. Oleh karena itu, KTT Helsinki tidak menjamin Turki bergabung dengan UE (Celiker, 1999 Helsinki Summit, 2019).

Chirac berpendapat bahwa Turki memiliki potensi menjadi anggota penuh Uni Eropa apabila Turki telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Chirac percaya bahwa Turki bisa mencapai tingkat ini hanya beberapa waktu. Walaupun demikian dengan hanya melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, belum tentu bisa bergabung dengan UE, hal ini dikarenakan menurut publik Prancis, menjadi anggota UE harus orang Eropa. Tahun 2002, Chirac menjelaskan apakah Turki diidentifikasi sebagai negara Eropa atau tidak, Chirac mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat dibahas dari sudut pandang geografis, tetapi Chirac tidak percaya bahwa mereka akan membahas dari sudut pandang sejarah dan peradaban.

Chirac mengklasifikasikan Turki sebagai bagian dari sistem Eropa melalui kemitraan politik, ekonomi, dan militer. Akan tetapi, dalam keanggotaan dewan Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) tidak menerima Turki menjadi bagian dari Eropa. Chirac harus berhati-hati dalam berkomentar tentang sikap keeropaan yang dimiliki Turki. Tahun 2003, Chirac menegaskan bahwa bukan untuk membahas apakah Turki masuk Eropa atau tidak, melainkan untuk memperhatikan dan menghargai fakta bahwa Turki sangat antusias menjadi anggota UE kurang lebih lebih dari 30 tahun. Chirac menyebutkan bahwa

Turki memiliki aset yakni tradisi negara sekuler, karena sekularisme Turki diilhami oleh *laïcité* Prancis. Di Prancis, konstitusi Turki melarang adanya penggunaan simbol dan praktik keagamaan di publik. Hal tersebut merupakan simbol positif untuk digunakan oleh Chirac untuk berargumen bahwa Turki tidak boleh dibelakang karena adanya perbedaan budayanya. Chirac bahkan memperingatkan tentang adanya kemungkinan peradaban jika keanggotaan Turki ditolak karena atas dasar etnis. Kesamaan inilah yang menyebabkan ketidakpuasan para skeptis Turki karena mereka menganggap jenis sekularisme yang diterapkan oleh Turki sebagai *alla turca*, artinya aspek budaya dan agama menghalangi doktrin sekuler berfungsi dengan baik. Masa pemerintahan Chirac menunjukkan bahwa adanya isu-isu yang bisa mengganggu suasana positif dalam hubungan bilateral. Kasus Armenia merupakan salah satu topik yang ‘mendarah daging’ yang harus ditangani Turki dalam beberapa kesempatan, tidak peduli seberapa besar dukungan Chirac terhadap keanggotaannya. Terkait masalah Armenia, Chirac menggarisbawahi perlunya Turki menghadapi sejarahnya. Menurut Chirac, setiap negara tumbuh dengan mengakui tragedi dan kesalahannya. Sementara itu, pada bulan September 2006 saat mengunjungi Armenia, Chirac tidak pernah kunjungan resmi ke Turki selama masa kepresidenan dari tahun 1995-2007 (Celiker, 3.1.3. The Main Arguments of Chirac’s Discourse, 2019). Akan tetapi, Turki belum bergabung dengan Uni Eropa sampai masa jabatan Chirac berakhir.

Prancis telah disediakan kerangka kebijakan luar negeri oleh UE. Uni Eropa juga menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan ekonomi dimana Prancis menjalin hubungan bilateral dengan kawasan maghreb di Afrika Utara dan negara-negara Islam di Timur Tengah. Insenti luas bagi negara-negara tersebut yaitu untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan UE. Prancis menjadi kunci utama dalam UE dan kawasan Maghreb serta menjadi lawan bicara. Prancis mencari warisan kolonial

mereka menjadi peran kunci lawan bicara antara Uni Eropa dan kawasan Maghreb. Untuk meningkatkan kemampuan Prancis untuk memainkan peran tersebut, Prancis berupaya meningkatkan kekuatan dan signifikansi lobi Mediterania di dalam UE, dengan meningkatkan kerjasama antara Italia, Spanyol, dan Prancis. Prancis telah berupaya mengembangkan bahasa dan pendekatan konseptual yang akan memperkuat peran lobi Mediterania di dalam UE (Laird, 2007).

2.1.2. Kebijakan luar negeri era Nicolas Sarkozy

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Sarkozy (2007-2012), dimana Prancis menentang keanggotaan Turki ke UE karena ketakutan politik, ekonomi, dan budaya dalam lingkungan Prancis, serta ketakutan terhadap islam yang ada di negara tersebut mengingat perdebatan yang berfokus pada pakaian dan praktik Islam. Perdebatan sengit sebelum referendum Konstitusi Eropa tahun 2005, sebuah garis anti-Turki yang dipromosikan oleh politisi sayap kanan yaitu Jean-Marie Le Pen dan Philippe de Villier dengan membuat poster “ *Non a la Turquie dan l’Europe*”. Selain itu, perbedaan budaya dan agama yang monolitik menjadi alasan utama Prancis menolak Turki ke UE, solusinya adalah dengan menawarkan Turki kemitraan istimewa sebagai ganti keanggotaan penuh di UE. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Turki bertanya kepada masyarakat Prancis bahwa pada prinsipnya mereka tidak menentang keanggotaan UE Turki. Prancis memiliki pendukung yang berpengaruh dalam UE sehubungan dengan posisinya di Turki, beberapa Negara anggota UE seperti Jerman yang mendukung terhadap penentangan Turki ke UE, sementara beberapa Negara anggota lainnya seperti Swedia, Inggris, dan Spanyol tidak menentang keanggotaan Turki ke UE asalkan Turki telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE. (Idiz, *Times Have Changed*, 2010, pp. 6-7)

Prancis telah melakukan pemblokiran jalur UE Turki dengan langkah-langkah konkret dengan cara memveto negosiasi dalam lima bab dari 35 bab yang akan dinegosiasi dengan Turki bahwa bab-bab tersebut akan membuka perspektif keanggotaan penuh. Ada lima bab yang diblokir oleh Prancis di antaranya yaitu Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Kelembagaan dan Kebijakan Daerah, dan Ketentuan Keuangan dan Anggaran. Prancis tidak masalah mengenai bab-bab yang tidak menunjukkan pada keanggotaan penuh serta sesuai dengan gagasannya tentang kemitraan istimewa. Para pejabat Prancis juga menjelaskan bahwa sebelum masa jabatan presiden Prancis di Uni Eropa tahun 2008, Prancis akan bersikap adil, netral, dan objektif terhadap Turki. Prancis memastikan bahwa bab tentang Masyarakat dan Media Informasi dan Arus Modal Bebas dibuka untuk negosiasi masuk ke UE. Menurut pengamat Prancis yakni Dorothee Schmid, seorang Pakar Turki Ifri Prancis bahwa bab-bab yang dibuka selama kepresidenan Prancis tidak menunjukkan adanya perubahan dari Sarkozy. (Idiz, Paris Obstructs Talks, 2010)

Hubungan bilateral antara Turki dengan Prancis sangat baik, dimana budaya Prancis lebih disukai oleh elite Ottoman, kemudian memuncak setelah Turki mengikuti sebagian republik Prancis dan mengadopsi prinsip-prinsip kedaulatan, sentralisme, etatisme, dan laisisme Prancis. Beberapa borjuasi republik Turki juga mengadopsi cara-cara perilaku Prancis, dengan demikian untuk seluruh generasi Turki, Prancis, dan semua hal tentang Prancis menjadi subjek kekaguman yang dalam. Hal tersebut bukanlah kepura-puraan, tetapi memang kelas dominan menganggap bahwa segala sesuatu yang layak dicita-citakan ada di Prancis. Namun, ada sisi negatif dari Prancis, yaitu pengkhianatan Prancis di Anatolia Timur, Turki sebagai penghasut minoritas Kristen melawan *Submille Port* saat Perang Dunia Pertama serta merupakan bagian dari

alam bawah sadar bersejarah bagi masyarakat Turki. Masalah Armenia menjadi racun bagi hubungan bilateral antara Prancis-Turki, topik tersebut menghilang selama empat dekade, kemudian dibahas kembali pada tahun 1970. Beberapa pecinta Prancis Turki seperti Ertugrul Ozkok dan Hurriyet akhirnya melawan Prancis karena desakan Presiden Sarkozy bahwa Turki bukan bagian dari Eropa. Politisi Prancis sayap kanan seperti Jean-Marie Le Pen dan Phillipe de Villiers telah berupaya yang terbaik untuk menggerakkan kegiatan ini dengan meningkatkan sentiment anti-Prancis bagi masyarakat Turki (Idiz, *Perceptions and Facts*, 2010)

Dalam pidato pada 7 Januari 2007 di Toulon, calon Presiden Prancis Sarkozy menciptakan *Union de la Mediterranee*, dimana porposal tersebut dimaksudkan untuk membuat perjanjian yang lebih kredibel dan menjauhkan Turki ke UE dengan memberikan penawaran alternatif keanggotaan Turki ke UE. Sarkozy berulang kali menentang adanya gagasan Turki bergabung dengan UE kemudian menyatakan bahwa Turki secara geografis dan budaya bukan bagian dari Eropa. Sarkozy Dalam posisi presiden menandai adanya reorientasi dalam kebijakan luar negeri Prancis. Faktanya, Turki harus tetap memenuhi beberapa persyaratan dalam penerimaan yang telah ditetapkan oleh UE, Chirac mendukung keanggotaan Turki UE. Pada tanggal 15 Desember 2004, Chirac telah menyatakan di televisi Prancis bahwa jika Prancis menolak keanggotaan Turki maka menjadi suatu kesalahan mengingat Turki telah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut (Hershco, *Turkey*, 2009, hal. 82-83).

Setelah pemilihan presiden Prancis, pada 27 Agustus 2007, Sarkozy menegaskan dalam pidato tahunan kepada korps diplomatik bahwa Sarkozy akan memblokir pembukaan lima bab spesifik dari negosiasi masuk ke UE yang membuka jalan bagi Turki untuk bergabung ke UE. Selain itu, Sarkozy menunjukkan bahwa negosiasi masuk ke UE mengenai 30 bab lainnya dapat dibuka bukan berarti Turki akan

bergabung dengan UE. Pembukaan bab-bab tersebut akan berfokus pada kemitraan yang diperkuat antara Belgia dan Turki, bentuk kerjasama yang didukung oleh Prancis. Namun, setelah adanya protes keras oleh Menteri Luar Negeri Turki Abdullah Gul, akhirnya dibatalkan karena gagasan untuk menghubungkan negosiasi penerimaan dan *Union for Mediterania* (Hershco, Turkey, 2009). Kemudian, di tanggal yang sama, Sarkozy menyampaikan tujuan dari kebijakan luar negeri Prancis kepada 180 duta besar Prancis di istana Elysee. Sarkozy mengingat harapan yang telah disematkan pada jatuhnya tembok Berlin dan runtuhnya tatanan Yalta, serta menunjukkan ancaman terhadap dunia kontemporer terkait terorisme dan ekonomi global.

Pada tanggal 6 Mei 2007, Sarkozy mengemukakan gagasannya mengenai *Union for Mediterranea* dalam konferensi pers pada pemilihan presiden Prancis di malam hari. Kemudian gagasan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan seluruh negara-negara Mediterania dalam sebuah organisasi baru yang akan menangani kepentingan bersama seperti anti-terorisme, energi, imigrasi, dan pembangunan berkelanjutan. memiliki dua tujuan yaitu politik dan geopolitik. Pada tanggal 23 Oktober 2007, Sarkozy juga mengembangkan gagasan ini pada sebuah pidato di Tangear, di balik gagasan ini ada tujuan politik dan tujuan geopolitik. Tujuan politik yaitu Prancis akan memberikan tawaran alternatif kepada Turki untuk bergabung ke Uni Eropa dan tujuan geopolitik yaitu Prancis akan memperkuat kiprahnya di kancah internasional (Mulyani, 2017).

Presiden Sarkozy juga menegaskan perlunya memperkuat kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa dan mengusulkan untuk mulai mengerjakan strategi keamanan baru untuk Eropa. Untuk itu, Sarkozy mengundang Jerman, Inggris Raya, Italia, Spanyol, Polandia, dan Belanda. Untuk mengantisipasi terhadap perbedaan pendapat dari anggota Uni Eropa tentang masa depan UE pada tahun 2020-2030, Sarkozy menunjuk sekitar 27 anggota Serikat dari komite orang bijak, yang terdiri dari sepuluh hingga dua

belas orang yang sangat dihormati yang tugasnya akan memikirkan masa depan Uni Eropa. Akan tetapi, rencana tersebut tidak dilaksanakan. Untuk melawan gerakan teroris, Sarkozy memperkuat pasukan Prancis di Afghanistan dan perjuangannya dengan Taliban. Sarkozy berpikir bahwa negara-negara barat mendukung negara-negara Arab untuk memodernisasi mereka, kemudian Sarkozy percaya pada dialog barat dengan Islam. Untuk itu, Sarkozy menjelaskan visinya tentang Uni Mediterania yang akan mencegah konfrontasi kedua peradaban tersebut. Walaupun Sarkozy mengungkapkan harapannya untuk regulasi damai konflik Palestina-Israel, Sarkozy menyatakan mendukung untuk Israel. Pada saat yang sama, Sarkozy tetap kritis terhadap perang di Irak, dan menuntut regulasi damai, sementara Sarkozy bermasalah dengan persenjataan nuklir Iran dan tidak mengusulkan solusi untuk masalah tersebut (Gmurczyk-Wronska, 2014).

Inkonsistensi dan ambiguitas pada sikap Sarkozy berasal dari pertimbangan realis. Presiden Prancis ingin menghindari adanya kritikan keras dari anggota-anggota Eropa, yang bereaksi keras terhadap keputusan untuk sepenuhnya memblokir negosiasi dengan Turki. Akan tetapi, alasan penting lainnya adalah bahwa Prancis tidak ingin Turki kecewa, karena Prancis menganggap Turki sebagai sekutu strategis dan kekuatan yang menstabilkan di kawasan Timur Tengah dan di Kaukasus. Faktanya, Prancis dan Turki telah mewujudkan kesamaan aktivisme pada beberapa masalah penting regional, mereka juga tampak sebagai rival yang bersahabat. Kedua negara telah berupaya memainkan peran sebagai mediator antara Israel dan Suriah. Oleh karena itu, pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Suriah sebelumnya dimulai oleh Turki dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan juga menghadiri pertemuan di Damaskus pada bulan September 2008. Contoh lain dari konvergensi adalah kebijakan yang diadopsi oleh Prancis dan Turki dalam upaya untuk mencapai kesepakatan

gencatan senjata selama operasi *Cast Lead Israel* di Gaza. Penyesuaian Turki dengan Iran menimbulkan tantangan lain bagi Prancis dan dunia barat, karena dapat membahayakan rencana mereka untuk mengisolasi Iran untuk memaksanya meninggalkan proyek nuklirnya. Sikap ambigu Sarkozy terhadap Turki menyebabkan hubungan bilateral kedua negara tidak membaik dan berdampak pada dialog UE-Turki dan semua dampak negatif yang ditimbulkan bagi hubungan Timur-Barat (Hershco, Turkey, 2009). Hingga masa jabatan Sarkozy berakhir, Turki belum bergabung ke Uni Eropa karena terhalang dari Sarkozy terhadap pemblokiran 5 bab negosiasi masuk ke UE.

2.1.3. Kebijakan luar negeri era Francois Hollande

Hubungan Prancis dan Turki pada masa pemerintahan Francois Hollande, dimana Hollande bertemu dengan Abdullah Gul untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2012 di Chicago untuk menghadiri pertemuan NATO. Pertemuan tersebut menghasilkan atmosfer positif dan diikuti oleh kedua menteri luar negeri, Laurent Fabius dan Ahmet Davutoglu yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Davutoglu membuat referensi ke kerjasama visioner antara kedua negara. Atmosfer positif didukung oleh Hollande untuk membantu membuka lembaran baru pada proses masuk Turki ke Uni Eropa meskipun Hollande membuat referensi ketidakmampuan Turki untuk menyelesaikan proses reformasi (harmonisasi UE) di salah satu pesan twitter sebelum pemilihan presiden tahun 2012. Fabius dan Davutoglu mengumumkan pembukaan bab baru (bab 22: kebijakan kawasan dan koordinasi pada instrumen struktural) pada tanggal 12 Februari 2013 dan disambut di Turki. Sejak konflik Erdogan dan Sarkozy telah berakhir,

pendekatan baru Prancis pada keanggotaan Turki pada Uni Eropa sudah ada sebagai langkah positif oleh Turki. Bab lain yaitu bab 17: kebijakan ekonomi dan moneter, telah dibuka antara Uni Eropa dan Turki pada bulan Desember 2015. Ini adalah tanda proses pemulihan hubungan yang terjadi antara kedua negara ketika Hollande sebagai Presiden. Ada juga langkah positif lainnya ketika Hollande jadi presiden. Seperti contoh, minat yang luas ditampilkan oleh anggota parlemen Prancis dan Turki pada parlemen ke aktivitas dari FEDIF (*Federation des Entreprenur Franco-Turcs*) dan PDP (*Plateforme de Paris pour le Dialogue Interculturel*) sebagai sinyal positif. Pada saat Hollande menjabat sebagai presiden, konsulat keempat Turki di Prancis telah dibuka di Bordeaux dan pembukaan yang kelima di Nantes telah diputuskan. Sebuah fakultas Teologi Islam telah dibentuk di Strasbourg dengan beberapa partisipasi yang datang dari direktorat urusan agama Turki. Pernyataan positif diungkapkan oleh ekonomi Prancis sekaligus menteri industri pembaruan dan teknologi informasi Mr. Arnaud Montebourg dan Arnaud baru-baru ini mengunjungi Turki yang merupakan puncak dari proses pemulihan hubungan. Namun, pada acara perayaan 100 tahun dari tahun 1915 menjadi kontroversi genosida armenia, yang menyebabkan masalah lagi pada hubungan bilateral. Hollande menyebutkan untuk pengakuan pada acara 1912 sebagai genosida oleh Turki yang berpartisipasi aktif dalam upacara peringatan yang diselenggarakan di Yerevan tahun 2015. Pidato yang dibuat oleh Hollande selama acara berlangsung sempat dilarang oleh menteri luar negeri Turki. (Örmeci, 2016).

Tambahan, Francois Hollande mengunjungi ke Turki selama dua hari pada tanggal 27-28 Januari 2014. Kunjungan tersebut mengingatkan pada saat 22 tahun lalu, Francois Mitterrand mengunjungi Turki pada tahun 1992 dan memiliki kepentingan historis. Sebelum mengunjungi ke Prancis, Turki sempat dikritik keras oleh Prancis dan negara Eropa lainnya karena penggunaan kekerasan oleh kepolisian Turki yang

meningkat selama protes taman Gezi tahun 2013. Presiden Hollande didampingi oleh grup besar, terdiri dari 50 pebisnis penting Prancis. Total ada 13 kesepakatan telah ditandatangani antara Prancis dan Turki selama kunjungan termasuk di bidang energi, transportasi, agrikultur, fasilitas kredit, dan *custom* demikian juga sebagai dokumen proklamasi strategi baru ditandatangani antara kedua menteri luar negeri. Dengan adanya dokumen tersebut, hubungan bilateral antara kedua negara memperoleh kerangka kelembagaan baru. Dokumen ini telah diikuti oleh kedua menteri luar negeri yang menandatangani pada rencana aksi untuk tahun 2014-2016. Pada perkembangan ini, Presiden Turki Erdogan membalas kunjungan ke kota Paris, Prancis. Kunjungan tersebut dikonfirmasi kesamaan kebijakan kedua negara terkait krisis suriah dan bahaya kelompok teroris ISIS. Presiden Hollande mengumumkan selama kunjungan tersebut bahwa Prancis siap membantu Turki untuk membuka dua bab baru yakni bab 23 dan 24 tanpa adanya kondisi. Hollande juga menunjukkan multidimensi sifat hubungan Prancis-Turki dan menambahkan bahwa Prancis siap untuk membuka jalan baru pada kerjasama dan kesepakatan di penerbangan sipil dan industri ruang angkasa.

Petualangan Turki untuk mewujudkan “*Blue Apple*” dan menjadi anggota penuh Uni Eropa dimulai pada saat KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Helsinki tahun 1999. Proses negosiasi dimulai tahun 2005 dan sejauh ini ada 15 bab yang sudah dibuka, meskipun hanya satu yang dihentikan. Sengketa Siprus yang merupakan isu protokol tambahan adalah syarat pembukaan 8 bab dan penutupan bab sesuai keputusan *General Affairs and External Relations Council* pada 11 Desember 2006. Menurut survei yang dilakukan oleh IFOP (*institut francais d’opinion publique*) tahun 2014, ada sekitar 83 persen masyarakat Prancis menentang Turki bergabung ke Uni Eropa. Persentase yang sangat tinggi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Prancis saat ini terhadap Turki tidak dapat diubah dengan mudah. Beberapa kelompok yang mendukung Turki

bergabung ke Uni Eropa sering membuat referensi kepentingan ekonomi Turki sebagai negara anggota dari *Custom Union*, memiliki populasi sekitar 80 juta dan menjadi ekonomi terbesar di dunia dengan peringkat 17. Dimata mereka, Turki menjadi negara sekutu yang tidak boleh didorong ke arah serikat atau blok lain. Bahkan, orientasi Eropa dari ekonomi Turki (37 persen dari total ekspor Turki dilakukan ke negara-negara Eropa dan 70 persen investasi langsung di Turki berasal dari Eropa) dan dukungan aktif Turki untuk operasi penjaga perdamaian di blok barat seperti di Bosnia Herzegovina dan Kosovo menjadikan negara tersebut penting bagi bangsa Eropa. Tambahan, Turki sangat membantu Uni Eropa dalam merancang dan melaksanakan kebijakan Pro-Eropa di Balkan, Kaukasia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Akan tetapi, Turki juga belum bergabung ke Uni Eropa setelah masa jabatan Francois Hollande berakhir.



BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PADA MASA KEPEMIMPINAN EMMAUEL MACRON

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kebijakan luar negeri Prancis pada era presiden-presiden sebelumnya, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Hal tersebut untuk menganalisis beberapa kebijakan luar negeri terhadap keanggotaan Turki di UE yang dibuat oleh Macron. Selain itu, menjelaskan adanya pernyataan yang dibuat oleh Macron dan tindakan yang dilakukan oleh Prancis terhadap Turki bergabung ke UE. Emmanuel Macron adalah presiden Prancis yang ke-25 pada era *the Fifth Republic*. Sejak Macron menjabat sebagai presiden, ada beberapa perubahan pada kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan pada presiden sebelumnya, yaitu Francois Hollande. Namun, untuk masalah Turki bergabung ke Uni Eropa, Prancis selalu membuka diskusi debat pada perluasan UE.

Lebih lanjut, bab ini akan menjelaskan secara jelas tentang kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Emmanuel Macron, kemudian menjelaskan respon pemerintah Emmanuel Macron terhadap Turki bergabung ke UE, dan menjelaskan Analisis penolakan pemerintah Emmanuel Macron dari ketiga variabel yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Penulis juga akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditulis dari bab sebelumnya.

3.1. Kepentingan Prancis di Uni Eropa

Mantan Perdana Menteri Prancis Michel Rocard juga menunjukkan aspek poin Turki dan menyatakan bahwa “Turki harus terintegrasi ke barat, untuk mencegah

pergerakannya ke Timur”. Di sisi lain, Kelompok yang menentang keanggotaan Turki ke UE mengacu pada kurangnya kemajuan Turki terkait dengan reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Negara tersebut. Alasan lain tidak disebutkan secara terbuka oleh Eropa adalah populasi Muslim Turki yang semakin meningkat dan keuntungan yang akan dinikmati negara ini di Parlemen Eropa apabila menjadi anggota. Sekarang jelas bahwa bagi populis dan nasionalis sayap kanan, keanggotaan UE Turki juga merupakan serangan terhadap identitas Eropa. Ada juga kekhawatiran di Prancis bahwa keanggotaan UE Turki akan menyebabkan gelombang besar migrasi dari negara tersebut ke Eropa. *National Front* dan *Republicans* menentang Turki bergabung ke UE, sedangkan sayap kiri-tengah dan ekstrem kiri mendukung Turki bergabung ke UE (Örmeci, 2016, hal. 146-147).

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang terdiri dari 27 negara anggota dan merupakan organisasi regional penggabungan dari *European Coal and Steel Community* (ECSC), *The European Atomic Energy Community* (Euratom), dan *European Economic Community* (EEC). Gagasan/ide terbentuknya Uni Eropa dimulai pada saat setelah terjadi perang besar di Eropa, beberapa negara di Eropa melihat bahwa lebih baik bekerja sama daripada melawan satu sama lain. Pada awal terbentuknya Uni Eropa, ada 6 negara yang menjadi pencetus utama, diantaranya adalah Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda. Ada beberapa tujuan dan nilai-nilai dari Uni Eropa yaitu adanya perdamaian di Eropa, masyarakat hidup dengan tenang, adanya kekuatan ekonomi Eropa dan negara yang menggunakan koin yang sama untuk melakukan bisnis bersama, bahasa dan budaya untuk semua masyarakat dihormati, semuanya adil untuk semua orang dan tidak ada yang tertinggal (Union, t.thn.).

Ada beberapa tahapan dalam negosiasi suatu negara yang ingin bergabung ke Uni Eropa, konferensi antar pemerintah merupakan proses negosiasi yang dilakukan antara

menteri, duta besar pemerintah Uni Eropa, dan negara kandidat. Fase pertama diperlukan penyaringan ketat dari undang-undang negara kandidat, kemudian dilanjutkan secara metodis melalui berbagai undang-undang UE yang harus diadopsi, diterapkan, dan ditegakkan oleh negara kandidat. Community Acquisition merupakan Negosiasi yang mencakup hak dan kewajiban lain yang harus diterima oleh semua negara anggota. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara kandidat dipantau dan dinilai secara teratur, dan kecepatan negosiasi ditentukan oleh hasilnya. Apabila semua pihak puas, maka proses tersebut diakhiri dengan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian masuk ke UE. Selama proses negosiasi masuk ke UE, kandidat dan calon negara kandidat dapat menerima dukungan melalui *Instrument for Pre-Accession Assistance* (IPA). IPA terdiri dari sejumlah program lintas batas dengan negara anggota UE yang mirip dengan fungsi dana struktural (Comission, t.thn.). Selain itu, setiap negara yang ingin bergabung dengan UE harus mengajukan permohonan ke Dewan Eropa yang meminta komisi untuk menyampaikan pendapat. Lalu, Parlemen Eropa diberitahu tentang aplikasi tersebut, kemudian apabila pendapat komisi mendukung, Dewan Eropa dapat memutuskan dengan suara bulat untuk memberikan status kandidat negara tersebut. Mengikuti rekomendasi komisi, Dewan Eropa memutuskan sekali lagi dengan suara apakah perundingan akan dibuka atau tidak. Jumlah undang-undang UE dibagi menjadi lebih dari 30 bab kebijakan. Sebelum memulai negosiasi masuk ke UE, komisi akan memberikan laporan penyaringan untuk setiap bab. Berdasarkan rekomendasi komisi, dewan memutuskan dengan suara apakah akan membuka bab negosiasi baru atau tidak. Jika kemajuan dinilai memuaskan, maka komisi dapat merekomendasikan 'penutupan sementara' sebuah bab. Dewan juga memutuskan dengan suara bulat ketika negosiasi masuk ke UE pada seluruh bab selesai, syarat dan ketentuan termasuk kemungkinan klausul.

Pada masa kepemimpinan Jacques Chirac, posisi Prancis di Turki tidak jelas, karena Chirac mendukung penuh Turki ke UE menjelang negosiasi masuk. Akan tetapi, Chirac mendapat tekanan yang sangat besar karena sebagian besar sayap kanan Prancis menentang keanggotaan Turki ke Uni Eropa karena mereka takut jika Turki bergabung dengan Uni Eropa. Presiden Nicholas Sarkozy memperjelas posisi Prancis dan secara eksplisit menyatakan menentang keras terhadap keanggotaan Turki di UE selama kampanye presiden. Selain itu, Parlemen Prancis memutuskan referendum nasional untuk memutuskan pertanyaan keanggotaan yang akan menghasilkan penolakan. adanya proteksionisme Prancis dan ketakutan akan gelombang besar pekerja Turki kemungkinan besar akan memperkuat oposisi tersebut. Untuk alternatif, Sarkozy membuat Union for Mediterranean yang akan mencakup Turki. (Briefings, 2008).

3.2. Kebijakan Luar Negeri Era Emmanuel Macron

Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Macron dimana kebijakan luar negeri Prancis merupakan pusat identitas nasional dan mempunyai otoritas yang luas dalam masalah pertahanan. Tanpa pengalaman, Macron perlu membuktikan kepada rakyat Prancis bahwa Macron dapat mengatur keamanan nasional Negara. Karena alasan tersebut, Macron mengingatkan kepada salah satu kunci utama anggota pada masa Hollande yaitu Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian. Macron secara eksplisit meletakkan kebijakan luar negerinya yang disebut dengan “konsensus Gaullio-Mitterrandist”, yakni kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibentuk dari kedua mantan presiden Prancis yaitu Charles De Gaulle dan Francois Mitterrand. Dengan mengikuti contoh-contoh tersebut, Macron tidak menghabiskan waktu pada isu-isu kebijakan luar negeri “lunak” yang sedang tren di kiri-tengah seperti pemerintahan global dan bantuan pembangunan. Selama kampanye, Macron memiliki latar belakang tentang masalah

ekonomi dengan berfokus pada isu keamanan, kemudian mengatrikulasikan kesediaan untuk bertindak secara tegas di luar negeri untuk membela kepentingan Prancis. Adanya pendekatan keras kepala tersebut akan membantu menyampaikan kesan bahwa Macron bukanlah anak muda yang tangguh.

Macron juga telah menetapkan program kebijakan luar negeri dan akan berupaya untuk bersikap serius dan solid. Bagi para kandidat, program tersebut belum bisa dibilang sempurna karena adanya panjang retorika dan pendek pada pilihan yang sulit. Namun, ada tiga pilar konseptual dasar untuk melihat lampauan dari retorika:

Yang pertama adalah *Openness*, Macron memiliki pandangan tentang dunia dimana adanya perubahan cepat dan interkoneksi yang semakin padat serta merupakan satu-satunya konstanta. Prancis yang memiliki pencapaian yang sangat membanggakan sepanjang sejarah, tidak akan menutup diri dari dunia dan menginginkan adanya perubahan yang berputar-putar di sekitarnya. Jika Negara Prancis menarik diri dari dunia, maka akan bertentangan dengan identitas Prancis sebagai Negara yang memiliki ambisi untuk membentuk arena global. Namun sebaliknya, Macron harus menemukan cara untuk tetap terbuka dan berkembang. Macron melihat Prancis mempunyai peluang, ancaman, dan memiliki aset yang sangat besar, selain itu memiliki jumlah populasi yang dinamis, ekspor yang kuat, status internasional, dan militer yang kuat. Aset tersebut berarti bahwa adanya trend penurunan Prancis dapat ditingkatkan. Akan tetapi, jika seorang pemimpin Prancis bisa memotivasi reformasi yang diperlukan pada struktur domestik Prancis dan mempertahankan jenis keterbukaan Prancis akan mendapatkan kekuatan. Keyakinan dan nilai keterbukaan Prancis diterjemahkan ke dalam pesan universalis yang jelas. Macron melihat Prancis sangat terbuka dalam perdagangan dan investasi, karena mempunyai kapasitas untuk menyerap dan mendapatkan keuntungan dari arus perdagangan, dan menegakkan aturan serta

menuntut timbal balik dari mitra utamanya. Prancis menganggap pengungsi menjadi beban bagi masyarakat, tetapi Macron melihat adanya “peluang ekonomi” bagi Prancis dan Eropa. Berkeyakinan pada perbatasan terbuka tersebut melampaui argument ekonomi, bahkan Macron juga menolak ,menutup pintu keanggotaan Turki di UE.

Yang kedua adalah kemerdekaan, dimana pendekatan Macron yang optimis namun kompetitif terhadap keterbukaan, kemerdekaan merupakan kebijakan luar negeri Prancis tradisional dan karakteristik hampir semua pemimpin Prancis dan calon presiden sejak era De Gaulle. Janji “Gaullo-Mitterrandist” yang diulang-ulang Macron bahwa kebijakan luar negeri jelas dan tegas dimaksudkan untuk meyakinkan para pemilih tentang adanya komitmen terhadap prinsip sakral tersebut. Oleh karena itu, Macron merasa bangga dengan prinsip tradisional kemerdekaan Prancis: otonomi pengambilan keputusan, penangkal nuklir, dan skeptisme tertentu terhadap kekuatan Amerika dan penghormatan Eropa terhadap Washington. Dalam istilah Gaullist klasik, Macron memperingatkan terhadap “mereka yang memiliki kebiasaan menunggu solusi untuk masalah mereka dari seberang Atlantik”. Setiap kandidat utama dalam pemilu memberikan penghormatan pada gagasan kemerdekaan. Akan tetapi, Macron mengambil pendekatan tertentu dengan melihat adanya otonomi kedaulatan Prancis kompatibel dan bergantung pada kerjasama dengan orang lain. Bagi Macron, kemerdekaan bukanlah kesendirian, melainkan adanya isolasi dimana beberapa lawan Macron ingin menurunkan Prancis bukanlah kepentingan nasional mereka. Jauh dari kemerdekaan Prancis, aliansi dan kerjasama Prancis terutama pada keanggotaan UE merupakan kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan Prancis. Hal tersebut berlaku bagi Prancis yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingannya dengan baik dan mengambil keuntungan dari peluang global dan mempertahankan pengaruh pada peristiwa dunia. Macron tidak menerima bahwa

NATO adalah penentu utama status Prancis di kancah internasional. Visinya tentang kemerdekaan lebih terpacu pada integrasi yang berkelanjutan dalam pertahanan Eropa, Macron melihat sebagai kunci utama bagi Eropa untuk memegang pengaruh di tangannya sendiri.

Ketiga adalah ambiguitas, dimana ambiguitas bukanlah konsep yang mencolok dalam kebijakan luar negeri, melainkan memiliki nilai politik yang jelas. Macron bersedia mengambil tindakan berani, seperti di Eropa atau mendukung serangan udara di Suriah. Akan tetapi, sebagian besar masalah kebijakan luar negeri Macron merangkul kontinuitas atau menikmati ambiguitas yang tidak biasa bagi kandidat presiden Prancis. Sebagian besar Macron diam tentang masalah Trump, hubungan China dan Rusia, pertanyaan tentang bantuan pembangunan luar negeri, dan strategi untuk menghancurkan ISIS. Perdebatan selama kampanye memaksa Macron untuk mengungkapkan lebih jelas pada beberapa topik. Secara khusus, Macron telah konfirmasi bahwa tidak akan mendukung pencabutan sanksi terhadap Rusia sampai Negara tersebut memenuhi kewajibannya di Ukraina. Di Suriah, Macron menekankan perbedaannya pada kebijakan Hollande daripada mengusulkan strategi yang jelas. Macron bersikeras bahwa ini merupakan kesalahan besar untuk membuat Assad pergi sebagai prasyarat untuk negosiasi mengingat Prancis “benar-benar terisolasi pada posisi tersebut”. Macron juga berpendapat bahwa mereka bersikeras pada pemerintahan Assad selanjutnya yang menyebabkan adanya kesalahan diplomatik dan moral, karena posisi tersebut akan mengajak kita untuk diskusi dan kompromi dengan seorang diktator berdarah. Akan tetapi, pola yang sangat besar telah menghindari hal-hal spesifik sehingga beberapa pakar mengkritik kecenderungan Macron untuk mengelak selama kampanye, terutama pada penggunaan frasa “dan pada saat yang sama” secara terus-menerus. Macron bersikeras bahwa ingin mengakui kompleksitas masalah

Prancis, akan tetapi terkait kebijakan luar negeri Prancis, ada beberapa ambiguitas yang lebih berkaitan dengan cara membuka pilihannya. Macron sering menekankan pada prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya daripada substansinya dan menyebutkan bahwa ambisinya bagi Prancis untuk menjadikan negara tersebut sebagai kekuatan keseimbangan dan dialog. Keinginannya untuk diplomasi yang jelas, tegas dan rencana untuk mengadakan diskusi realis dan menuntut mitranya tanpa menawarkan hal spesifik. Hal tersebut belum tentu dilaksanakan karena Macron tidak memiliki gambaran, karena mencerminkan fakta bahwa masa muda dan kurangnya pengalaman Macron berada pada tingkat tersebut memiliki nilai jual utamanya. Macron dapat memberikan harapan dan impian terhadap mereka tentang Prancis di masa yang akan datang. Hal tersebut membuat kebijakan Macron sulit diprediksi dan akan sulit untuk melepaskan ambiguitasnya, adanya optimisme yang sangat terinspirasi dan dipersonifikasikan oleh Macron yang menjadi bagian dari kurangnya kekhususan ini. (Shapiro, 2017)

3.3. Respon Pemerintah Emmanuel Macron Terhadap Perkembangan di Turki dan di Prancis

Turki mengalami krisis Hak Asasi Manusia selama empat tahun terakhir dengan dramatis pada aturan hukum dan kerangka demokrasi. Sementara itu, konsolidasi kekuasaan Erdogan yang tidak terkendali masih berlanjut, pada saat pemilu pada tanggal 31 Maret 2019, Erdogan melihat Partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) bersekutu dengan sayap kanan kalah di kota-kota besar termasuk Istanbul dan Ankara, walaupun memenangkan 51 persen suara secara nasional. Kandidat oposisi Ekrem Imamoglu secara masif meningkat kemenangannya tipis di Istanbul dalam pemilu ulang pada tanggal 23 Juni 2019 yang secara kontroversi disahkan oleh Dewan Pemilihan Tinggi tanpa ada alasan yang jelas. Adanya kontrol eksekutif dan pengaruh politik atas

peradilan di Turki menyebabkan pengadilan secara sistematis menerima dakwaan palsu, menahan dan menghukum tanpa bukti kuat dari aktivitas kriminal individu maupun kelompok yang dianggap pemerintah Erdogan sebagai lawan politik, diantaranya adalah jurnalis, politisi oposisi, dan aktivis serta para pembela Hak Asasi Manusia. Kelompok besar merupakan orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan gerakan yang dijalankan oleh ulama Sunni yang berada di Amerika Serikat, Fethullah Gulen dituduh pemerintah sebagai dalang utama dari masalah kudeta Turki yang gagal pada Juli 2016. Pada 9 Oktober setelah penarikan pasukan AS dari wilayah tersebut, Turki kemudian menguasai wilayah di timur laut Suriah, lalu dibantu oleh aktor non-negara Suriah. Tujuan utama Turki yaitu untuk menghilangkan pasukan Kurdi dan pemerintahan yang menguasai daerah tersebut karena memiliki hubungan dekat dengan PKK bersenjata yang terlibat dalam konflik selama puluhan tahun.

Tiga tahun kemudian pasca kudeta Turki, tuduhan terorisme terus disalahgunakan. Pada tahun 2019, Kementerian Kehakiman menyatakan ada 69.259 orang sedang diadili dan 155.560 orang masih dalam penyelidikan kriminal atas tuduhan terorisme dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan Gulen, gerakan yang disebut sebagai organisasi teroris Fethullahist (FETÖ) oleh pemerintah Turki. Dari jumlah tersebut, ada 29.487 orang ditahan di penjara baik yang belum divonis maupun setelah divonis. Ada sekitar 8.500 orang, termasuk politisi dan jurnalis ditahan di penjara yang belum divonis maupun setelah divonis karena diduga berkaitan dengan *Partîya Karkerên Kurdistanê* (PKK / KCK) juga banyak yang diadili tetapi bebas, meskipun angka resmi tidak dapat diperoleh. Pada bulan Juli 2018, gubernur provinsi diberikan kekuasaan ekstra untuk membatasi pergerakan dan pertemuan di provinsi mereka dengan alasan ketertiban umum dan masalah keamanan. Hal tersebut mempengaruhi gelombang

demonstrasi di beberapa wilayah tenggara yang sebagian besar orang Kurdi dan beberapa kelompok LGBT di seluruh negara.

Dalam kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, ada 119 jurnalis dan pekerja media berada dalam tahanan atas pelanggaran seperti menyebarkan propaganda teroris dan keanggotaan organisasi teroris. Ratusan lainnya juga diadili meski tidak di penjara, namun sebagian besar media dan televisi menyesuaikan diri dengan garis politik kepresidenan Erdogan. beberapa aturan yang dibuat oleh Turki dimana siaran berita melalui youtube, netflix, Periscope dan platform lainnya akan dikenakan biaya. *Radjo ve Televizyon Üst Kurulu* (RTUK) akan diperiksa dan dikenakan sanksi seperti penangguhan konten apabila dianggap melanggar hukum Turki, kemudian penyiar internet harus mendapatkan lisensi untuk siaran di Turki begitu juga dengan media internet lainnya dari luar negara, jika terjadi pelanggaran, maka akan terjadi penangguhan. Kelompok Hak Asasi Manusia khawatir bahwa peraturan baru tersebut akan mengakibatkan penyensoran lebih lanjut terhadap berita online dan konten lainnya. Pihak berwenang akan memerintahkan untuk memblokir situs web dan menghapus konten online, sementara ribuan orang di Turki menghadapi penyelidikan kriminal, penuntutan, dan hukuman atas postingan media sosial mereka. Ada peningkatan drastis dalam jumlah kasus tuduhan hina presiden sejak pemilu pertama Erdogan sebagai presiden tahun 2014, sejak April 2017 Wikipedia tetap diblokir oleh Turki.

Turki membuat kemajuan dengan reformasi yang dimulai dengan bergabung ke UE pada tahun 1999 kemudian berkembang lebih jauh dengan perubahan radikal pada konstitusi tahun 2004 yang dibuat dengan beberapa partisipasi wakil dari partai AKP. Undang-undang harmonisasi yang diperkenalkan sebagai perpanjangan dari proses tersebut dan keputusan pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) membawa perkembangan pada tingkat normatif, namun perubahan tersebut dalam praktiknya

tidak cukup dibalas dan diinternalisasikan oleh mekanisme publik, khususnya pasukan keamanan. Faktanya bahwa pada periode tersebut langkah-langkah ini walaupun formal diambil untuk menyelesaikan masalah Kurdi, meningkatkan harapan adanya perdamaian di beberapa kalangan. Dalam konteks ini, signifikansi yang besar melekat pada amandemen konstitusi yang dibuat pada tahun 2010, tetapi adanya perubahan tersebut tidak bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tahap terakhir dalam meningkatnya otoritarianisme yaitu upaya kudeta yang gagal pada tanggal 15 Juli 2016. Pemerintah Turki menyatakan bahwa gerakan Gulen berada di balik percobaan kudeta tersebut, dan beberapa partai-partai mengungkapkan pandangan yang sama dalam berbagai kesempatan. Pada tanggal 20 Juli 2016 keadaan darurat (OHAL) diumumkan selama 90 hari (No.2016/9064). Setelah proklamasi pertamanya, OHAL diperpanjang sebanyak enam kali.

Menurut data dari media berita, adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) akibat OHAL (*Olaganustu Hal*) yaitu lebih dari 108.400 dan 6011 pegawai sipil telah diskors dan diberhentikan serta 62.864 guru diskors atau diberhentikan, 2.163 telah dipecat. Prosedur telah dimulai terhadap akademisi dan administrator dengan jumlah sekitar 6.792 orang, jumlah polisi yang diberhentikan sekitar 10.026, para tentara Turki yang dipecat sekitar 3.939 orang. Selain itu, 35 industri kesehatan, 1.061 lembaga pendidikan, 800 asrama mahasiswa, 223 kursus, 129 yayasan, 1.125 asosiasi, 15 universitas 19 serikat pekerja dan 4.262 organisasi telah ditutup. Walaupun mekanisme peradilan harus efektif dalam kaitannya dengan perkembangan Hak Asasi Manusia, selama proses OHAL berlangsung, ada dua puluh persen hakim dan jaksa yang diberhentikan dan harta benda mereka telah disita. Beberapa dari mereka telah ditangkap dan ditahan di penjara, termasuk dua anggota Mahkamah Konstitusi. Adanya penolakan perkara yang diajukan terhadap tindakan berdasarkan ketetapan tersebut

akibat kegagalan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pemberhentian berdasarkan ketetapan ini atau membuat mereka menunggu dan disisi lain keterlambatan pengangkatan anggota komisi yang akan memeriksa tindakan tersebut dan ECHR menemukan dua kasus yang tidak dapat diterima menyebabkan korban dari keputusan tersebut putus asa.

Untuk kebebasan berekspresi (pasal 10 Konvensi) setelah 15 Juni 2016, ada 162 jurnalis ditahan di penjara, angka tersebut membuat Turki masuk ke daftar puncak global dalam hal jurnalis yang dipenjara. Selain itu, ada 200 jurnalis ditahan, 66 orang diantaranya ditangkap selama OHAL berlangsung dan 2.308 jurnalis kehilangan pekerjaan. Ada sekitar 28 saluran televisi, 5 kantor berita, 55 surat kabar, 18 majalah, 35 radio dan 2 penerbit ditutup, kemudian lebih dari 20 situs berita diblokir aksesnya dan 29 percetakan telah dicabut lisensi. Dari 39 stasiun, ada 23 stasiun televisi dan radio yang disiarkan dalam bahasa Kurdi dan beberapa surat kabar Kurdi telah ditutup. Beberapa orang yang diduga mempunyai hubungan dengan gerakan Gulen telah dikenakan penangguhan yang meluas, pemecatan, penangkapan, dan kehilangan hak di bidang lain. Misalnya, orang yang diberhentikan oleh KHK (Kanun Hükümünde Kararname) juga dicabut paspornya dan mendapati bahwa prosedur lain di kantor publik terhenti. Deklarasi OHAL memiliki dampak negatif bagi pada Kurdi, ada 9 anggota parlemen termasuk wakil presiden dari Partai Demokrat Rakyat Pro-Kurdi (HDP) saat ini ditahan di penjara. Beberapa perwakilan dan walikota terpilih HDP telah ditangguhkan, diberhentikan, atau ditangkap atas tuduhan terror. Masalah Kurdi mengalami dejavu yang teringat pada tahun 1990. Angka tersebut sangat penting untuk memberi kita gambaran tentang situasi Hak Asasi Manusia di Turki. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kepada Negara mitra Turki, Recep Tayyip Erdogan bahwa tidak ada peluang Turki bergabung dengan Uni Eropa. Namun, sebagaimana

Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker menyatakan bahwa semua tergantung bagaimana Turki bisa memenuhi persyaratan UE meskipun Turki menjauh dari persyaratan tersebut. (Cinar, 2018)

Pada tahun 2019, isu islamofobia sedang meningkat di Negara Prancis. Di kota Bayonne, Prancis, seorang pria berusia 84 tahun membakar sebuah masjid, kemudian dua orang berusaha menghentikannya, namun sang pria menembak kedua orang itu sebelum akhirnya ditangkap. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan para pemimpin Muslim di Istana Elysee dan Macron mendesak mereka untuk meningkatkan upaya memerangi ekstremisme agama. Peristiwa tersebut hanya bagian dari lingkaran setan saling tuduhan dan demonisasi yang meletus di Prancis sejak pembunuhan empat polisi oleh seorang rekan kerja yang masuk Islam. Hal tersebut menimbulkan eskalasi islamofobia yang sangat mengkhawatirkan karena dipicu sebagian kata dan tindakan Macron dan para pejabat lainnya.

Dalam pidatonya di upacara penghormatan terhadap keempat polisi yang tewas, Macron menyerukan masyarakat untuk bertindak sebagai penghalang melawan islam radikal. Macron juga menyerukan untuk bangkit melawan islamisme bawah tanah yang merusak anak-anak Prancis dengan mengidentifikasi hal-hal kecil yang menjadi tragedi mengerikan. Tiga hari kemudian, seorang politisi sayap kanan di kota Dijon menyerang seorang ibu Muslim yang mengenakan kerudung saat kunjungan sekolah ke dewan daerah. Kemudian meminta presiden dewan untuk memerintahkan ibu tersebut melepas kerudung atau meninggalkan majelis karena kehadirannya tidak diterima mengingat keterkaitan peristiwa pembunuhan empat polisi. Hal tersebut menjadi pertanyaan tentang apa yang dipakai oleh wanita muslim kembali ke sorotan publik, semua latar belakang tersebut mengundang emosional. Serangkaian debat televisi dan radio selalu melibatkan wanita berjilbab. Pada hari yang sama terjadi serangan masjid

di Bayonne, sehingga Senat Prancis mempertimbangkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang wanita mengenakan jilbab saat kunjungan sekolah. Pada tahun 2011, Prancis melarang pemakaian cadar di depan umum, sementara pejabat public termasuk guru tidak diperbolehkan memakai jilbab.

Macron mengatakan bahwa tidak ada yang distigmatisasi mengenai pemakaian jilbab atau kerudung, tetapi upaya pemerintah untuk memerangi kekerasan ekstremis semakin terlihat seperti serangan budaya terhadap praktik keagamaan Islam. Menteri Dalam Negeri Prancis, dalam pidatonya di Majelis Nasional mengatakan bahwa perilaku religius konservatif termasuk berdoa teratur dan mencolok, menumbuhkan janggut, dan menolak untuk bertukar ciuman dengan seorang wanita saat menyapa, sebagai tanda-tanda radikalisme. Di universitas negeri di Cergy Pontoise, staf kampus melaporkan siswa yang menampilkan daftar indikator praktik ortodoks yang serupa, kemudian meminta maaf setelah adanya protes tersebut.

Prancis memiliki rezim tindakan agresif yang menargetkan Muslim, pertama kali diperkenalkan setelah serangan Paris pada November 2015, kemudian disahkan menjadi undang-undang dua tahun lalu. Individu dapat dibolehkan untuk tinggal dengan tetap tunduk pada pembatasan kebebasan bergerak, kemudian digeledah rumah atau diberhentikan dari pekerjaan, sebagian besar berdasarkan informasi intelijen rahasia tanpa proses. Pidato yang dinilai sebagai permintaan maaf atas terorisme juga bisa dituntut. Dengan adanya ini, masyarakat agar melaporkan dan dipanggil ke kantor polisi setelah informasi anonim yang mengungkapkan kekhawatiran tentang perilaku mereka. Bahkan Seorang wanita yang masuk agama Islam menerbitkan akun sesi wawancara di akun Facebook pada tanggal 17 Oktober, yang meliputi pertanyaan tentang masjid, keluarga, dan cara berpakaian. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tidak hanya melanggar hukum tetapi juga kontraproduktif karena dua alasan.

Pertama, adanya penindasan dan perlakuan diskriminasi menimbulkan kebencian, kedua hubungan dengan masyarakat tidak baik, yang merupakan sekutu terbaik polisi dalam upaya menjaga keselamatan umum. Sebuah artikel di *Le Monde*, mencatat bahwa dari 59 serangan teroris yang diklaim Kementerian Dalam Negeri telah dicegah di wilayah Prancis dalam enam tahun terakhir, ada 58 serangan yang mengandalkan sumber intelijen manusia. (Hollo, 2019)

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan agar tidak menstigmatisasi Muslim atau mengaitkan agama Islam dengan perang melawan terorisme. Macron mengatakan dalam konferensi pers hari Rabu bahwa mereka harus berdiri bersama dengan warga negara kami. Hal tersebut terjadi ketika seorang wanita Prancis mengambil langkah hukum terhadap politisi sayap kanan yang telah mengkritik karena mengenakan jilbab di depan umum. Beberapa aturan seperti dilarang mengenakan jilbab di sekolah-sekolah Prancis dan untuk pegawai negeri juga dilarang memakai jilbab di tempat kerja mereka. Prancis secara resmi merupakan negara sekuler dalam hal pakaian tertutup yang menjadi perbincangan kontroversi dalam beberapa tahun terakhir. Seorang ibu Muslim yang memakai jilbab selama perjalanan sekolah bersama sang putra menuju parlemen daerah di *Bourgogne-Franche-Comté* di Prancis timur menerima pelecehan secara verbal dari ruangan tersebut. Sebuah gambar wanita bernama Fatima bersama putranya dibagikan secara luas setelah rekaman kejadian tersebut diposting di media sosial.

Hal tersebut menimbulkan demonstrasi jalanan di daerah tersebut dan menjadi perdebatan mengenai cadar. Saat ini, Prancis tidak memiliki undang-undang mengenai larangan wanita mengenakan jilbab dalam perjalanan sekolah. Pada hari Rabu, Macron menyerukan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam di Prancis dan mengutuk apa yang Macron gambarkan sebagai jalan pintas fatal untuk menghubungkan Islam

dengan terorisme. Macron mengatakan bahwa ada banyak ketidaktanggungjawaban di antara komentator politik dan komunalisme bukanlah terorisme. Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer menjelaskan bahwa undang-undang tersebut tidak melarang perempuan yang mendampingi anak-anak mengenakan jilbab, walaupun secara pribadi berpendapat bahwa mengenakan jilbab tidak diinginkan dalam masyarakat Prancis. Insiden di gedung parlemen regional di Prancis timur terjadi saat piknik sekolah pada hari Jumat 11 Oktober dimana Fatima menemani sang putra yang masih kecil, kemudian seorang politisi sayap kanan Marine Le Pen yang dikenal sebagai *National Front* melihat selama debat berlangsung dan memerintahkan untuk melepas cadarnya. (BBC, Macron warning on stigmatising Muslims amid France veil row, 2019)

Selain itu, kasus islamofobia di Prancis juga terjadi yaitu adanya larangan pakaian burkini untuk berenang di pantai dan kolam renang, beberapa wanita muslim di Prancis protes terhadap larangan tersebut. Salah satunya adalah tempat kolam renang Jean Bron yang menerapkan larangan burkini. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa pakaian renang burkini memiliki simbol Islam dan tidak sesuai dengan sekularisme. Kelompok Aliansi warga Grenoble membuat Operasi Burkini untuk membela hak perempuan muslim. Beberapa kelompok tersebut berganti pakaian menjadi burkini, lalu diberitahukan oleh penjaga kolam bahwa pakaian renang mereka tidak diperbolehkan. Lalu, mereka memasuki kolam renang kemudian bersorak dan bertepuk tangan selama satu jam. Setelah itu, mereka diinterogasi oleh polisi, kemudian membayar denda senilai € 35 karena melanggar aturan. Kedua perempuan muslim yang terlibat dalam proses tersebut adalah Hasiba dan Latifa, mereka terlibat karena memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka mengatakan bahwa mereka punya mimpi ingin bersenang-senang di kolam renang seperti warga lainnya, menemani anak-anak

mereka kapan pun asal anak-anak senang saat musim panas di Grenoble. (BBC, Muslim women defy ban to swim in burkinis at French pool, 2019)

3.4. Analisis Penolakan Pemerintah Emmanuel Macron

Sebelum membahas mengenai analisis penolakan Prancis era Emmanuel Macron terhadap keanggotaan Turki bergabung ke Uni Eropa, Turki telah menjadi negara kandidat Uni Eropa sejak Helsinki Summit tahun 1999 dan menjadi negara kandidat terlama yang sampai saat ini belum bergabung dengan UE. Namun, Turki juga mengalami beberapa masalah yang terjadi, di antaranya yaitu masalah kudeta Turki tahun 2016 yang menyebabkan kekacauan di kota hingga penangkapan ribuan orang, termasuk beberapa pejabat Turki dan Jurnalis. Tidak hanya itu saja, berbagai masalah yang terjadi di Turki seperti kasus HAM dan diskriminasi agama, dimana terjadinya larangan wanita memakai jilbab dalam kampus maupun saat kerja. Selain itu, Turki juga menghadapi berbagai masalah yaitu, menghentikan imigran yang mengungsi di kawasan Eropa pasca konflik Suriah, Turki juga tidak bisa mengatasi membludaknya para imigran yang ke Eropa sehingga banyak yang tidak terurus.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di istana Elysee Paris, Prancis pada tanggal 5 Januari 2018. Macron mengatakan bahwa perkembangan politik di Turki telah diblokir pada tawaran masuk ke UE, tetapi Macron menyarankan untuk menjadi kemitraan daripada keanggotaan penuh UE. Dikutip dari France24, sebuah berita televisi yang berada di Paris, Macron juga mengatakan bahwa untuk hubungan bilateral dengan Uni Eropa, jelas bahwa perkembangan dan pilihan baru-baru ini tidak memungkinkan adanya kemajuan dalam proses tersebut. Macron mengatakan pada saat *press conference* dengan Presiden Erdogan bahwa tidak akan membuka bab baru pada negosiasi masuk ke UE (XIn, 2018) .

Emmanuel Macron menyatakan bahwa hubungan bilateral dengan Turki harus berlanjut namun pemerintah Turki telah gagal untuk memenuhi norma demokrasi dan Hak Asasi Manusia UE. Macron mengatakan bahwa Turki tetap menjadi mitra penting UE dan hubungan bilateral harus dipertahankan bahkan jika Negara tersebut mengambil giliran yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Selain itu, Turki telah menyimpang dari Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir karena akan mengkhawatirkan melangkahi sasaran dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut menyangkut pada pembaruan *customs union*. Macron tidak mau hubungan bilateral dengan Turki renggang karena Turki merupakan mitra penting dalam berbagai krisis yang mereka hadapi, terutama tantangan imigrasi dan ancaman teroris (Talinn, 2017).

Selain itu, Macron juga mengatakan bahwa perkembangan di Turki tidak ada kemajuan dalam dorongan selama puluhan tahun untuk bergabung dengan Uni Eropa. Macron menyebutkan bahwa adanya kemitraan yang akan menghentikan Turki untuk bergabung dengan UE. UE menyatakan keprihatinan atas terjadinya tindak kekerasan Turki terhadap tersangka pendukung kudeta 2016 yang gagal. Ada sekitar 50.000 orang ditangkap dan menunggu hasil sidang dan 150.000 termasuk guru, jurnalis dan hakim, dipecat atau diskors dari pekerjaan (Reuters, 2018). Macron juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Turki dengan cara berkomunikasi dengan Erdogan. Topik pembicaraan yang akan dibahas adalah mengenai pembebasan jurnalis Prancis yang dipenjara di Turki. Dengan memenuhi tuntutananya, pemerintah Turki mengirim pesan bahwa mereka melihat Prancis sebagai sekutu di kawasan Eropa. Kemudian, Macron berupaya untuk memperkuat hubungan Prancis-Turki dengan cara yang berbeda dari presiden sebelumnya yang mengelola hubungan bilateral melalui saluran Eropa. Sarkozy yang mengoposisi Turki keanggotaan UE dengan memveto beberapa bab

negosiasi Turki ke UE, lalu Hollande yang mencoba untuk memperbaiki hubungan bilateral Turki dengan cara mencabut blokade Prancis di salah satu bagian. Macron ingin bertaruh untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Turki dan menolak prospek Turki untuk bergabung ke UE. Macron mendesak untuk menghentikan kemunafikan yang dimana perkembangan alami menuju pembukaan bab baru adalah mungkin dan disarankan untuk memikirkan kembali formula baru dari dialog selama konferensi pers bersama dengan presiden Erdogan.

Lebih lanjut, Turki juga merupakan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Sejak era pemerintahan Erdogan, Turki mengalami pasang surut dimana Turki pernah mengalami krisis ekonomi tahun 2008 dan akhirnya bisa diatasi. Tidak hanya itu saja, berbagai masalah yang dialami oleh Turki sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan UE.

Pada subbab ini, peneliti akan menganalisis ketiga variabel dari rumusan masalah berdasarkan teori *Constructivisme* Nicolas Onuf yaitu *Speech Act*, *Deeds*, dan *Rules* melalui bentuk tabel.

Variabel	Aplikasi
<i>Speech Act</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian pidato oleh Emmanuel Macron dalam acara Ambassador's Week pada tanggal 29 Agustus 2017. - Statement Macron mengenai intervensi Turki ke Suriah.
<i>Deeds</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan Kontribusi Prancis di Suriah. - Kebijakan Luar Negeri Prancis yaitu memberantas terorisme.

<i>Rules</i>	<p>-4 Kerjasama antara UE-Turki yaitu terorisme, ekonomi, <i>custom union</i>, dan liberalisasi visa.</p> <p>- Walaupun hubungan bilateral antara Prancis-Turki renggang, tetapi kerjasama tetap dilakukan.</p>
--------------	---

3.4.1. Speech Act Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE.

Speech Act adalah performa sosial berimbas langsung dan memiliki konsekuensi, serta sebagai bahasa yang mempresentasikan dan performative. Manusia menggunakan bahasa untuk mempresentasikan kebutuhannya dalam kata-kata dan kata-kata tersebut menampilkan kebutuhan. Kemudian, variabel tersebut diaplikasikan melalui statemen yang disampaikan oleh Macron terhadap Turki dan juga pidato Macron mengenai kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Presiden Prancis. Dalam hal ini, statemen yang disampaikan oleh Macron antara lain intervensi yang dilakukan oleh Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah dan pidato mengenai kebijakan luar negeri Prancis dalam acara *Ambassadors Week 2017*.

Pada tanggal 29 Agustus 2017, diadakan sebuah acara pertemuan yaitu *Ambassadors Week 2017* yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pejabat dan Presiden Prancis. Pada pertemuan ini, Emmanuel Macron selaku presiden Prancis memberikan pidato mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dilaksanakan selama masa kepresidenannya, salah satunya yaitu Terorisme Islam dimana Macron ingin Prancis menjadi negara yang berinisiatif dan bisa memberikan solusi ketika ada krisis yang baru terjadi dan Prancis mampu berperan penting untuk menghancurkan kelompok teroris yang sedang berkembang di kawasan

Timur Tengah. Macron juga mengatakan bahwa perang melawan kelompok teroris Islam akan menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Prancis demi keamanan negara Prancis. Selain itu, Macron juga berupaya untuk memerangi terorisme dengan cara memasuki negara Suriah yang merupakan pusat kelompok teroris ISIS. ISIS mulai merencanakan serangan yang akan mengancam kepentingan, kehidupan, dan rakyat Prancis. (Diplomacy, Speech by President Emmanuel Macron - Ambassadors' Week 2017, 2017)

Pada bulan Desember 2018, Prancis kecewa keputusan Amerika Serikat atas penarikan beberapa pasukan tentara di Suriah. Macron kemudian mengatakan bahwa *“an ally must be reliable”* (sekutu harus dapat diandalkan). Lebih lanjut, Macron merasa kecewa atas keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat sehingga Turki bisa menguasai Suriah untuk menghabisi pasukan Kurdi. PKK dan YPG adalah kelompok teroris yang berada di Suriah, *Kurdistan Workers Party* (PKK) merupakan salah satu organisasi teroris masuk daftar hitam oleh Prancis dan Prancis mendukung YPG serta melakukan pertemuan dengan pemimpin SDF (*Syrian Democratic Forces*) (AFP, Turkey warns France ‘no benefit’ in protecting Syrian Kurd militia, 2018).

Pada tanggal 18 Januari 2019, Emmanuel Macron menyampaikan sebuah pidato di pangkalan militer di Toulouse pasca penarikan pasukan tentara Amerika Serikat di Suriah, yang berbunyi *“the retreat from Syria announced by our American ally cannot make us deviate from our strategic objective: eradicating Daesh by depriving this terrorist organization of any territorial footprint and preventing its resurgence. The fight is not over. France has deployed 1200 soldier as part of its effort against the Islamic State Jihadists”*. Pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa meskipun Amerika Serikat menarik pasukan tentara di Suriah, tetapi Prancis tetap fokus pada tujuan strategis yaitu memberantas kelompok teroris dengan

mencabut jejak teritorial kelompok teroris dan mencegah kebangkitannya. Prancis juga mengerahkan sekitar 1200 tentara sebagai bagian dari upaya melawan kelompok teroris ISIS di Suriah. (Agency, 2019)

Pasca serangan intervensi Turki di Suriah pada bulan 9 Oktober 2019, Prancis menanggapi terhadap intervensi Turki, dimana Turki harus menghentikan serangan tersebut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Prancis, Jerman, dan Inggris bekerja sama dengan membentuk deklarasi bersama untuk mengecam aksi intervensi Turki di Suriah. Selain itu, UE juga menuntut atas tindakan Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah dan apa yang dilakukan Turki tidak akan terwujudnya zona aman yang Turki buat serta Turki memiliki masalah keamanan di area perbatasan. Menurut UE, tindakan militer yang dilakukan oleh Turki akan memperburuk konflik di Suriah, namun tindakan politik bisa menjadi cara efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut (AFP, World calls for restraint, warns of resurgent IS as Turkey begins Syria assault, 2019).

Presiden Turki Erdogan mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah Macron mengecam keras intervensi Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah. Lebih lanjut Macron mengatakan bahwa NATO mengalami masalah internal karena kurangnya kerjasama antar-negara anggota NATO. Macron sangat menentang terhadap tindakan pasukan Militer Turki atas serangan terhadap pasukan Kurdi di Suriah dan Turki bisa membahayakan aksi koalisi anti ISIS dimana Turki merupakan negara anggota NATO. Erdogan kemudian mengatakan bahwa Turki berhak ikut campur tangan di Suriah mengingat wilayah Turki dekat dengan Suriah, Erdogan mengatakan kepada Prancis bahwa apa urusanmu di Suriah? Lakukan dengan sesuka hati, kamu akan menghormati hak Turki untuk memberantas terorisme, cepat atau lambat tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak Prancis mengatakan akan memanggil staf kedubes Turki di Paris, Prancis untuk membahas mengenai penghinaan

yang dilakukan oleh Erdogan. kemudian, Pihak staf presiden tidak mau berkomentar terhadap penghinaan oleh Turki sehingga hubungan bilateral antara Prancis dan Turki tidak membaik (AFP, Erdogan attacks Macron as ‘brain dead’ after French leader’s Syria criticism, 2019).

Tidak hanya sampai disitu saja, sebelum diselenggarakan pertemuan KTT NATO di London pada tanggal 3 Desember 2019, hubungan bilateral antara Prancis-Turki sedang merenggang karena penghinaan yang diucapkan oleh presiden Turki Erdogan terhadap Prancis “*brain dead*”, sehingga kedua negara saling berdebat atas intervensi yang dilakukan oleh Turki di Suriah. Macron mengatakan di sela pertemuan dan menghubungkan Turki dengan kelompok teroris ISIS, Prancis tidak bisa membawa pulang pasukan ISIS Prancis yang tergabung dalam kelompok Kurdi di Suriah. Macron mengatakan ketika Macron melihat Turki sedang melawam secara bahu-membahu melawan teroris dan bekerja dengan proxy ISIS. Kemudian, Prancis bekerja sama dengan organisasi teroris YPG untuk melawan ISIS di Suriah. Macron mengatakan bahwa ambiguitas dengan lawan Turki kelompok ini merugikan semua orang karena situasi di Suriah. Macron juga berpendapat bahwa prioritas nomor satu tidak menjadi ambiguitas dengan kelompok-kelompok YPG, melainkan dengan memulai pembicaraan tentang hubungan bilateral dengan Turki (Wires, 2019).

3.4.2. Deeds Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE

Deeds merupakan suatu konsep/variabel dimana tindakan yang mengikuti pernyataan dari aktor atau dari *Speech Act* dan membentuk hubungan sosial serta memberikan makna. Setelah aktor menyampaikan sebuah statemen, kemudian individu akan bertindak sesuai apa yang disampaikan oleh pembicara dan membangun hubungan sosial. Penulis akan menganalisis menggunakan konsep Deeds mengenai tindakan yang

dilakukan oleh Prancis mengenai kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Prancis dan pasca intervensi Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah.

Pada tanggal 29 Agustus 2017, Emmanuel Macron membuat sebuah kebijakan yaitu memberantas kelompok terorisme Islam dimana kebijakan ini sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri Prancis yang dibuat oleh Macron, dengan melakukan intervensi ke negara-negara Timur Tengah, salah satunya negara Suriah yang memiliki kelompok teroris terbesar yaitu ISIS. Macron mengatakan dalam pidato *pertemuan French Ambassadors* di istana Elysee Paris, Prancis, Macron ingin Prancis bisa inisiatif dan mengusulkan solusi ketika ada krisis yang terjadi di suatu negara dan memberantas kelompok terorisme Islam adalah prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Prancis serta keamanan Prancis menjadi tujuan utama dari diplomasi. Selain itu, Macron juga ingin Prancis mengambil peran penting dalam penyelesaian konflik Suriah. Macron kemudian mengatakan bahwa kelompok ISIS merupakan musuh terbesar Prancis, Prancis akan mengambil peran dengan cara memulihkan dan menstabilkan perdamaian di Suriah serta Prancis harus berperan untuk menyelesaikan masalah. (John Irish, France's Macron sets fighting 'Islamist terrorism' as main policy goal, 2017)

Pada bulan Maret 2018, Prancis memberikan dukungan dan bekerjasama dengan pasukan Kurdi untuk memberantas terorisme di Suriah. Prancis memberi dukungan ke SDF (*Syrian Democratic Forces*), salah satu kelompok Kurdi di Suriah untuk menciptakan stabilitas di Suriah Utara dan melawan ISIS serta pihak pasukan Kurdi mengatakan bahwa Macron telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan tentara Prancis di Suriah. Namun, dukungan tersebut memicu kritikan dari negara sendiri atas respon operasi militer Turki melawan pasukan militer YPG, dimana YPG dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki. Pihak Prancis telah mempersembahkan untuk pengorbanan dan penentu peran dari kelompok SDF untuk melawan ISIS. Macron

berjanji kepada kelompok SDF untuk menciptakan stabilitas keamanan di Suriah Utara dalam kerangka pemerintahan yang bersifat inklusif dan seimbang untuk mencegah kebangkitan dari kelompok ISIS. Prancis juga memperpanjang pelatihan dan mengirim senjata api kepada kelompok YPG untuk melawan kelompok teroris ISIS dan memiliki beberapa pasukan khusus yang berbasis di Suriah, yang membuat negara Turki geram atas tindakan yang dilakukan oleh Prancis. (John Irish, France's Macron vows support for northern Syrians, Kurdish militia, 2018)

Pada tanggal 14 April 2018, Prancis melakukan tindakan di Suriah dengan cara berperang melawan kelompok teroris ISIS dan mencapai perdamaian dan stabilitas negara di Suriah. Selain itu, Prancis tetap melanjutkan peranannya dan strategi di Suriah yaitu melanjutkan perjuangan untuk melawan kelompok terorisme ISIS bersama dengan negara lainnya dari koalisi internasional, memberikan dukungan kepada SDF (*Syrian Democratic Forces*) melalui dukungan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan, mempromosikan resolusi politik untuk konflik khususnya mendukung upaya PBB dan ini merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan dan peluang Suriah untuk mencapai perdamaian serta perang melawan kejahatan di Suriah. (Diplomacy, War in Syria: Understanding France's position, 2020)

Upaya Prancis dalam mendukung pasukan Kurdi yaitu kelompok SDF ternyata berimplikasi terhadap ketegangan hubungan antara Prancis dan Turki. Prancis dalam hal ini, mendukung pasukan Kurdi di Suriah dengan menyediakan senjata api sedangkan Turki menentang kelompok Kurdi di Suriah sehingga memperburuk hubungan bilateral antara Prancis-Turki dan Turki menganggap YPG adalah kelompok teroris yang sedang mereka lawan. Macron melakukan pertemuan dengan delegasi SDF (*Syrian Democratic Forces*) dan berjanji akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke

Suriyah, mengirim bantuan kemanusiaan dan menjadi penengah antara Turki dan pasukan Kurdi. (24, 2018)

Presiden Prancis Emmanuel Macron kedatangan tamu yaitu delegasi SDF (Syrian Democratic Forces) di Istana Elysee, Prancis dan berjanji akan mendukung penuh untuk melawan kelompok teroris ISIS, sebuah kelompok yang mempunyai ancaman terhadap keamanan dunia. Namun, Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron karena menyambut delegasi SDF di Istana Elysee. Kemudian, Turki menuduh Macron bahwa Macron telah memberikan legitimasi buatan kepada kelompok teroris. Prancis juga mengalami ketegangan dengan Turki setelah Macron menjadikan tanggal 24 April sebagai hari nasional untuk memperingati genosida Armenia. Prancis menjadi salah satu kekuatan utama yang mendukung pasukan Kurdi dalam memberantas ISIS di Suriyah dan Prancis juga menyuarakan dukungan untuk tuntutan politik Kurdi. Presiden Prancis juga berupaya untuk mencegah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam penarikan pasukan di Suriyah. Prancis juga menempatkan ratusan tentara Prancis di Kurdistan, Suriyah untuk mendukung perjuangannya melawan pasukan ISIS dan menciptakan stabilitas di Suriyah. (Barwari, 2019)

Presiden Prancis Emmanuel Macron memiliki dua tujuan utama di Suriyah, yaitu menghancurkan kelompok teroris ISIS dan memasang proses politik yang bersifat adil di Suriyah. Prancis merupakan mitra utama dalam koalisi global melawan ISIS yang berusaha untuk mengambil kembali wilayah yang telah dikuasai oleh ISIS dan memastikan stabilitas di wilayah Suriyah. Selain itu, Prancis mengirim 1910 pasukan dari masyarakat Prancis ke Suriyah untuk melawan ISIS dan kembali dengan selamat, namun ada sekitar 225 pejuang yang telah kembali ke Prancis. Peran Prancis dalam koalisi menjadi sangat penting setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump

mengumumkan pada bulan Desember 2018 untuk menarik pasukan tentara dari Suriah. Pada tahun 2019, Macron menjadi komandan kekuatan barat terbesar di Suriah dan ada 70 tentara Prancis yang bertugas sebagai penasihat SDF di Suriah utara dan ada 200 pasukan khusus yang beroperasi di Suriah. Macron berkomitmen bekerjasama dengan SDF dan YPG dengan menyediakan senjata dan memberikan pelatihan kepada pasukan YPG yang menjadi mitra penting untuk melawan pasukan ISIS. (Nijkerk, 2019)

Lebih lanjut, Prancis juga berkontribusi dengan menyumbangkan sekitar 1 miliar Euro untuk masyarakat Suriah yang mengalami krisis, pengungsi dan tuan rumah, khususnya Lebanon dan Yordania. Ini juga termasuk dana hibah senilai 200 juta Euro dan 937 juta Euro dalam bentuk pinjaman dan sejalan dengan mobilisasi Prancis dalam menanggapi krisis Suriah sejak konferensi di London tahun 2016. Pada tahun 2018, Prancis berkomitmen memberikan dana program darurat senilai 50 juta Euro yang sedang dilaksanakan dan ditujukan untuk membantu penduduk di wilayah yang dibebaskan dari ISIS oleh Pasukan Demokrat Suriah dengan dukungan koalisi global. Prancis akan terus mendukung kepada masyarakat Suriah yang sedang kesulitan dan beberapa negara pengungsi, yang kembali menjadi sukarela berdasarkan standar internasional. (Diplomacy, Syria – Humanitarian assistance – France’s participation in the Brussels III Conference (12-14 March 2019), 2019)

Pasca intervensi yang dilakukan oleh Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah tanggal 9 Oktober 2019, Prancis mengambil tindakan dengan cara menghentikan dan melarang ekspor senjata api ke Turki karena serangan intervensi terhadap pasukan Kurdi YPG di Suriah dan Prancis telah memperingatkan kepada Turki bahwa intervensi di Suriah utara telah mengancam keamanan Eropa. (Times, 2019) Selain itu, UE juga memperingatkan kepada Turki mengenai sanksi yang akan didapatkan pasca serangan intervensi terhadap pasukan Kurdi di Suriah utara. (CNBC, 2019)

Prancis juga melakukan tindakan dengan mengancam keras kepada Turki dan mengutuk operasi tersebut, kemudian Prancis melaporkan ke PBB untuk diberikan sanksi kepada Turki serta mendeklarasikan bahwa Turki menyebabkan NATO dalam bahaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron merasa murka terhadap Turki atas intervensi terhadap Kurdi di Suriah dan menimbulkan ketidakpercayaan hubungan bilateral antara Prancis dan Turki sehingga terjadi ketegangan hubungan bilateral antara Prancis-Turki berdampak pada proses negosiasi Turki ke UE. (Schmid, 2020)

3.4.3. Rules Pemerintahan Prancis era Macron dalam Penolakan Turki bergabung ke UE

Rules merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai pernyataan *what we should do*. *What* merujuk pada standar perilaku apa yang seharusnya dilakukan agen, kemudian *should* merujuk kepada objek untuk melakukan hal yang mejadi standar pelaksanaan, apabila agen mampu dan berhasil melakukan apa yang diminta oleh agen, maka akan mendapatkan hadiah, tetapi jika tidak melakukannya maka akan mendapatkan hukuman, inilah yang disebut sebagai konsekuensi dari aturan. Pada kasus dari Prancis terhadap Turki bergabung ke UE, Prancis adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di UE, kemudian Turki menjadi negara kandidat UE, beberapa bab sudah dibuka untuk negosiasi masuk ke UE. Namun, proses negosiasi Turki ke UE terhenti karena Prancis memblokir lima bab negosiasi masuk ke UE.

Macron mengatakan bahwa Turki tetap menjadi mitra utama UE dan hubungan bilateral antara Prancis-Turki harus dipertahankan walaupun Turki telah menjauh dari persyaratan UE. Uni eropa harus memutuskan apakah Turki diterima sebagai negara anggota UE atau tidak. Macron berpendapat bahwa walaupun Turki telah menjauh dari persyaratan UE tetapi Macron khawatir jika Turki melakukan yang tidak benar. Macron tidak mau hubungan bilateral dengan Turki semakin renggang dan menganggap Turki

sebagai mitra penting dalam menghadapi masalah, terutama pada tantangan imigrasi dan ancaman teroris. Gagasan yang disampaikan oleh Macron adalah bagian dari rules, dimana Prancis menganggap bahwa meskipun Turki tidak memenuhi persyaratan UE dan menjadi Negara kandidat, tetapi Prancis tetap menjaga hubungan bilateral agar terhindar dari konflik. UE melakukan perjanjian kesepakatan dengan Turki untuk mengatasi membludaknya migrasi dari Timur Tengah menuju kawasan Eropa melalui wilayah Turki dari area konflik Suriah. Hubungan Turki dengan Uni Eropa sedang memburuk pasca kegagalan kudeta Turki bulan Juli tahun 2016 dilanjutkan dengan penangkapan 10.000 warga di Turki. Hubungan Prancis dan Turki mengalami ketegangan dimana Turki menahan Jurnalis Prancis, kemudian kedua negara harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih lanjut, Prancis akan berkunjung ke Turki pada tanggal 14 September 2017 untuk membahas mengenai masalah penahanan jurnalis Prancis di Turki. (Irish, 2017)

Negara-negara Eropa melihat bahwa Turki telah menjauh dari UE karena Turki tidak memenuhi persyaratan norma demokrasi UE sehingga perkembangan negosiasi Turki ke UE sudah tidak bisa dilanjutkan. Pada bulan Juni 2018, Dewan UE menyatakan bahwa perhatian Eropa terhadap kemunduran Turki yang terus menerus menyebabkan kekhawatiran tentang supremasi hukum dan hak-hak fundamental termasuk kebebasan berekspresi dan penurunan fungsi peradilan dan mandiri. Proses negosiasi Turki bergabung ke UE sudah tidak dilanjutkan karena tergantung dari pihak Turki apakah bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari UE atau tidak. Beberapa pelanggaran yang dialami oleh Turki diantaranya adalah masalah kudeta Turki yang menyebabkan kegagalan Turki dalam menangani masalah tersebut dengan penahanan puluhan ribuan orang.

Walaupun Turki tidak bisa bergabung dengan Uni Eropa, UE tetap melakukan kerjasama dengan Turki sebagai bagian dari masa depan hubungan bilateral antara Turki dan Uni Eropa. Ada empat potensi kerja sama antara UE dan Turki yaitu *custom union*, kerjasama dalam memberantas terorisme, liberalisasi aturan visa, dan dialog ekonomi dan politik. Pertama adalah modernisasi *Custom Union*, dimana dengan memiliki teknologi terbaru dan peningkatan besar pada arus perdagangan, mereka butuh peningkatan kesepakatan perdagangan yang telah disimpulkan lebih dari dua dekade. Modernisasi perlu dilibatkan tidak hanya dalam perluasan cakupan pada layanan dan agrikultur tetapi juga pada area horizontal seperti pemantauan bantuan negara dan pentingnya juga adalah mekanisme sengketa penyelesaian yang lebih fungsional. Kedua adalah kerjasama dalam memberantas terorisme, dimana UE akan kerjasama dalam pemberantasan terorisme dengan Turki ke dalam agenda Pemerintahan anggota UE dan UE sendiri. Ketiga, liberalisasi peraturan visa, pada isu ini, Turki menjalin kerjasama dengan UE pada bidang visa, bagi warga Turki yang ingin pergi ke kawasan Eropa harus menjadi perbaikan yang sangat menguntungkan dalam hubungan UE-Turki. Namun, liberalisasi peraturan visa berdasarkan dari aturan, khususnya pada pelaksanaan kebijakan antiterorisme Turki. Untuk saat ini, UE-Turki tidak ada kesepakatan mengenai reformasi undang-undang anti-teroris Turki, Turki mengalami kemajuan pada aspek yang lebih teknis dari negosiasi, seperti pengenalan paspor biometrik Turki. Keempat, dialog ekonomi dan politik, beberapa dialog antara UE dan Turki telah membentuk awal permulaan yang sederhana. Hal tersebut terjadi pada bidang kebijakan ekonomi, transportasi, energi, dan kebijakan luar negeri dengan tujuan untuk bertukar pikiran dan posisi tentang masalah-masalah yang terjadi serta proyek-proyek yang dibuat menjadi kepentingan bersama. Dialog ini akan berlanjut

pada tahun 2019 dan tergantung pada perbaikan supremasi hukum di Turki dan konvergensi antara Turki dan Belgia dalam kebijakan luar negeri (Pierini, 2019).

Para diplomat Prancis dan Turki yaitu Mevlut Cavusoglu dan Jean Yves Le Drian akan bertemu pada tanggal 13 Juni untuk membahas mengenai masalah perang Suriah, agenda Uni Eropa Turki yang bermasalah, dan masalah politik bilateral. Hubungan antara Prancis dan Turki mengalami ketegangan karena adanya ketidaksepakatan tentang beberapa masalah bilateral dan regional. Pada bulan Mei, Turki telah menolak pernyataan Prancis tentang kegiatan pengeboran Turki di landasan kontinen di Laut Mediterania timur setelah Prancis menyatakan keprihatinan ketika Turki telah meluncurkan pengeboran minyak dan gas di wilayah tersebut. ketegangan hubungan bilateral antara Prancis dan Turki yaitu permintaan Turki untuk membuka sekolah Turki di Prancis yang telah didukung oleh kedutaannya. Turki telah berupaya dengan pemerintah Prancis untuk mendirikan sekolah Turki sesuai dengan sistem pendidikan Prancis dalam kerangka timbal balik dengan sekolah-sekolah Prancis di Turki. Namun, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer menyatakan bahwa Prancis tidak menerima gagasan Turki membuka sekolah menengah di Prancis karena pemerintah Turki ingin membahwa ideologi Turki ke Prancis melalui sekolah-sekolah ini. (Ankara, 2019)

Pasca hubungan bilateral antara Prancis dan Turki renggang, kedua negara menghadapi krisis di Mediterania Timur. Pada tanggal 10 Juni, terjadi krisis angkatan laut terhadap kedua negara di pantai Libya menyebabkan hubungan bilateral Prancis-Turki tidak membaik sebelum KTT NATO di London dan memanggil Komisi UE untuk memberikan sanksi ke Turki. Lebih lanjut, Prancis mengutuk keputusan Turki terhadap *Hagia Sophia* dari tempat museum diubah menjadi tempat ibadah masjid. Prancis kecewa atas keputusan Mahkamah Agung Turki mengubah Museum *Hagia*

Sophia menjadi masjid. Dalam insiden yang terjadi di Libya, adanya pelanggaran embargo oleh Turki dan sejarah pemalsuan dan perdagangan manusia. Prancis tentu saja mencela intervensi Turki di Libya bersamaan dengan PBB mengakui GNA (*Government of National Accord*) di Tripoli. Sebelum berpartisipasi di *Operation Sea Guardian*, Prancis diminta untuk para sekutu tegas sungguh-sungguh dalam beberapa lampiran dan komitmen untuk menghormati embargo. Prancis membutuhkan Turki di kawasan MENA (Middle East and North Africa) yang mengalami kekacauan, dimana penyimpanan senjata berbahaya nuklir di Iran hingga kebuntutan perang sipil di Suriah dan krisis politik dan ekonomi di Lebanon ke perang Libya serta permainan pengaruh kekuasaan. Kemudian, adanya isu migrasi lalu Turki mampu melakukannya pada krisis migrasi, dengan mengerahkan beberapa personil polisi untuk menghadang para imigran Timur Tengah ke kawasan UE agar tidak terjadi membludak para imigran. Terlepas dari itu, Turki memiliki peran utama untuk memberantas kelompok bersenjata seperti AQMI, MUJAO, dan Boko Haram. (Toumi, 2020)

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dengan berbagai dinamika perkembangan hubungan bilateral antara Prancis-Turki dari beberapa Presiden Prancis, maka pada bab ini akan dapat di simpulkan/dirangkum dari awal hingga akhir. Pertama, adanya keinginan dari Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa sudah lama dan melalui perjalanan panjang sejak tahun 1987, kemudian menjadi Negara kandidat tahun 1999 dari KTT Helsinki. Tahun 2005 dimulai negosiasi masuk UE sehingga dibuka 15 bab dari 35 bab negoasiasi masuk UE.

Beberapa respon dari beberapa pemimpin pemerintah Prancis mengenai Turki bergabung ke UE mengalami pasang surut. Hal tersebut terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri, mulai dari Jacques Chirac sampai Francois Hollande. Beberapa pemimpin presiden ada yang mendukung Turki bergabung dengan UE karena telah dianggap memenuhi persyaratan dari UE dan ada juga yang menolak karena beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Saat Macron menjadi presiden dinamika hubungan bilateral dengan Turki mengalami pasang surut, mengingat perkembangan perpolitikan di kedua Negara cukup fluktuatif sehingga sangat berpengaruh pada kebijakan Prancis terhadap Turki untuk bergabung Uni Eropa. Kemudian, dari sinilah peneliti akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa Prancis masih menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa, yaitu kasus islamofobia yang terjadi di beberapa wilayah Prancis yang mayoritas beragama islam yang

mengakibatkan hubungan bilateral kedua Negara memanas. Kedua, perkembangan politik di Turki pasca kudeta tahun 2016, dimana beberapa kebijakan luar negeri Turki yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia dan praktik yang mencederai proses demokrasi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Turki justru menjauhkan pemerintah Turki pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh UE untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Ketiga, intervensi yang dilakukan oleh Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah menyebabkan Prancis merespon dengan mengecam atas tindakan tersebut, sehingga proses negosiasi Turki bergabung ke UE semakin sulit.

Memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan luar negeri Prancis era Emmanuel Macron terhadap Turki bergabung dengan UE dalam posisi menolak dan lebih disarankan melakukan kemitraan istimewa dan tetap mempertahankan hubungan bilateral antara Prancis-Turki. Beberapa jawaban dari rumusan masalah telah dianalisis berdasarkan dari teori *Constructivism* oleh Nicholas Greenwood Onuf. Dari teori ini, ada tiga variabel yang akan menjawab dari rumusan masalah, yaitu *Speech Act*, *Deeds*, dan *Rules*.

Speech Acts yang mengimplementasikan ke pernyataan yang diucapkan oleh Emmanuel Macron terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang diumumkan oleh Macron dan intervensi yang dilakukan oleh Turki terhadap Pasukan Kurdi di Suriah yang menyebabkan hubungan bilateral kedua negara tidak membaik. Kemudian, *Deeds* juga mengimplementasikan dimana setelah Prancis merespon terhadap Turki atas intervensi di Suriah dan mengumumkan kebijakan luar negeri Prancis, Prancis bertindak dengan mengutuk aksi Turki kemudian melaporkan ke PBB untuk diberikan sanksi ke Turki dan berinisiatif untuk intervensi ke Suriah dengan kerjasama dengan Pasukan Kurdi untuk memberantas kelompok teroris ISIS sehingga hubungan bilateral

antara Prancis dan Turki menjadi tegang dan berdampak pada proses negosiasi Turki bergabung ke UE.

Terakhir, *rules* dimana Pasca hubungan bilateral antara Prancis dan Turki renggang, Prancis tetap menjadikan Turki sebagai mitra penting bagi UE. Kemudian, walaupun Turki tidak memenuhi persyaratan dari UE, Turki tetap menjadi mitra dalam berbagai masalah, khususnya masalah migrasi dan teroris. Walaupun demikian, Prancis tidak mau hubungan bilateral dengan Turki semakin kacau dan ingin tetap menjalin hubungan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Prancis tetap menolak terhadap keanggotaan Turki ke UE dengan alasan sebagai berikut:

1. terjadinya islamophobia.
2. Turki belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
3. Turki gagal menangani berbagai masalah setelah gagalnya kudeta Turki tahun 2016 yang mengakibatkan praktik Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang menurun.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab tersebut, penulis telah membuktikan mengapa Prancis tetap menolak Turki bergabung dengan UE berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Penulis melihat adanya penolakan Prancis terhadap Turki bergabung dengan UE, sehingga ada beberapa saran dan rekomendasi untuk melengkapi penelitian ini selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti merekomendasikan keberlanjutan adanya proses negosiasi Turki bergabung ke UE beserta beberapa bab yang telah dibuka dan beberapa bab yang diblokir.
2. Peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat apa saja kebijakan luar negeri Prancis pada era kepemimpinan Emmanuel Macron.

DAFTAR PUSTAKA

- 24, F. (2018, march 31). *Macron has crossed a line with Turkey*. Retrieved from France 24: <https://www.france24.com/en/20180331-france-turkey-macron-kurds-erdogan-syria-ypg-manbij-crossed-line>
- AFP. (2018, December 25). *Turkey warns France 'no benefit' in protecting Syrian Kurd militia*. Retrieved from The Time of Israel: <https://www.timesofisrael.com/turkey-warns-france-no-benefit-in-protecting-syrian-kurd-militia/>
- AFP. (2019, November 29). *Erdogan attacks Macron as 'brain dead' after French leader's Syria criticism*. Retrieved from The Times of Israel: <https://www.timesofisrael.com/erdogan-attacks-macron-as-brain-dead-after-french-leaders-syria-criticism/>
- AFP. (2019, October 10). *World calls for restraint, warns of resurgent IS as Turkey begins Syria assault*. Retrieved from The Times of Israel: <https://www.timesofisrael.com/world-calls-for-restraint-warns-of-resurgent-is-as-turkey-begins-syria-assault/>
- Agency, A. N. (Director). (2019). *France will stay 'militarily engaged' in Mideast in 2019: Macron* [Motion Picture].
- AKCAY, E. Y. (2018). *France View of Turkey-EU relations in the period of Francois Hollande: Go Where fast*, 75-80.
- Ankara. (2019, Juni 12). *Turkey, France to discuss Syria, strained bilateral affairs*. Retrieved from hurriyetdailynews: <https://www.hurriyetdailynews.com/top-french-diplomat-due-in-turkey-for-bilateral-talks-144122>
- Aslan, D. H. (2014). History of Turkish-French Relations. *The Historical Background and the present state of Turkish-French Relations*, 123-126.
- Barwari, R. (2019, April 19). *Turkey furious over Amcron's meeting with Syrian Kurds*. Retrieved from Kurdistan24: <https://www.kurdistan24.net/en/story/19417-Turkey-furious-over-Macron%27s-meeting-with-Syrian-Kurds>
- BBC. (2019, October 17). *Macron warning on stigmatising Muslims amid France veil row*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-50079997>
- BBC. (2019, June 24). *Muslim women defy ban to swim in burkinis at French pool*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-48744153>
- BBC. (2020, October 25). *BBC*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-54678826>
- Beverly Hancock, E. O. (2009). Qualitative Aproach. In E. O. Beverly Hancock, *An Introduce to Qualitative Research* (pp. 9-12). Nottingham: National Institute for Health Research.
- Board, E. (2018, January 08). *Emerging Turkish-French partnership*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/editorial/2018/01/08/emerging-turkish-french-partnership>
- Briefings, E. (2008). 2. France. *Turkey's Quest for EU Membership*, 6.
- Celikel, E. (2019). Jacques Chirac Period (1999-2007): Discourses and Developments . In E. Celikel, *Problematique in Turkish-French Relations: The French Perspective on Turkey's Candidacy for European Union Membership* (p. 14). Ankara: Middle East University.
- Celiker, E. (2019). 1999 Helsinki Summit. In E. Celiker, *PROBLEMATIQUE IN TURKISH-FRENCH RELATIONS: THE FRENCH PERSPECTIVE ON*

- TURKEY'S CANDIDACY FOR EUROPEAN UNION MEMBERSHIP* (pp. 14-15). Ankara: Middle East University.
- Celiker, E. (2019). 3.1.3. The Main Arguments of Chirac's Discourse. In E. Celiker, *PROBLEMATIQUE IN TURKISH-FRENCH RELATIONS: THE FRENCH PERSPECTIVE ON TURKEY'S CANDIDACY FOR EUROPEAN UNION MEMBERSHIP* (pp. 15-17). Ankara: Middle East University.
- Cinar, O. H. (2018, May 2). *Chronic human rights problems of Turkey during the EU accession process*. Retrieved from Open Democracy: <https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/chronic-human-rights-problems-of-turkey-during-eu-accession-process/>
- CNBC. (2019, October 12). *Germany and France ban arms exports to Turkey after military offensive against Kurds in Syria*. Retrieved from CNBC: <https://www.cnbc.com/2019/10/12/germany-bans-exports-of-arms-to-turkey-after-syria-offensive.html>
- Comission, E. (n.d.). *European Commission*. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/a/accession-negotiations
- Diplomacy, F. (2017, August 29). *Speech by President Emmanuel Macron - Ambassadors' Week 2017*. Retrieved from France Diplomacy: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/ambassadors-week/prior-editions/ambassadors-week-edition-2017/speech-by-president-emmanuel-macron-ambassadors-week-2017/>
- Diplomacy, F. (2019, March 12). *Syria – Humanitarian assistance – France's participation in the Brussels III Conference (12-14 March 2019)*. Retrieved from France Diplomacy: Syria – Humanitarian assistance – France's participation in the Brussels III Conference (12-14 March 2019)
- Diplomacy, F. (2020, June). *War in Syria: Understanding France's position*. Retrieved from France Diplomacy: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/war-in-syria-understanding-france-s-position/>
- Embassy, F. (2018, February 13). *President sets out foreign policy goals for 2018*. Retrieved from France in the United Kingdom: <https://uk.ambafrance.org/President-sets-out-foreign-policy-goals-for-2018>
- Fr, T. L. (2018, February 4). *France and Turkey to work on new 'roadmap' to end Syrian war*. Retrieved from The Local Fr: <https://www.thelocal.fr/20180204/france-and-turkey-launch-push-to-end-syrian-war>
- Gauin, M. (2012). the Anti-turkish Campaign and the Responses. *Ending a Decade or Errors(2001-2011)? Past, Present, and Prospect of the Franco-Turkish Relations*, 74-79.
- Gmurczyk-Wronska, M. (2014). FRANCE DURING THE PRESIDENCY OF NICOLAS SARKOZY. In W. A. Marszalek, *Athenaeum Polish Political Science Studies* (pp. 52-53). Adam Marszalek.
- Grigoriadis, I. N. (2006). Privileged Partnership. *Turkey's Accession to the European Union: Debating the Most Difficult Enlargement Ever*, 154.
- Hershco, T. (2009). Turkey. *Sarkozy's Policy in teh Middle-East: A Break with the Past*, 82-83.
- Hershco, T. (2009). Turkey. *Sakozy's Plicy in the Middle-East: A Break with the Past?*, 83-84.

- Hollo, L. (2019, November 5). *Islamophobia is on the rise in France*. Retrieved from AlJazeera: <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/11/5/islamophobia-is-on-the-rise-in-france>
- Idiz, S. (2010). Paris Obstructs Talks. In S. Idiz, *Turkey's French Problem* (pp. 8-9). Paris: Ifri.
- Idiz, S. (2010). Perceptions and Facts. In S. Idiz, *Turkey's French Problem* (pp. 10-11). Paris: Ifri.
- Idiz, S. (2010). Times Have Changed. In S. Idiz, *Turkey's French Problem* (pp. 6-7). Paris: Ifri Programme Turquie contemporaine.
- Ing, M. B. (2020, October 29). *NBC*. Retrieved from NBC: <https://www.nbcnews.com/news/world/offensive-charlie-hebdo-cartoon-pushes-turkey-france-tensions-overdrive-n1245064>
- Irish, J. (2017, September 7). *France's Macron urges continued EU ties with Turkey*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-france-turkey/frances-macron-urges-continued-eu-ties-with-turkey-idUSKCN1BI0SQ>
- John Irish, M. P. (2017, August 29). *France's Macron sets fighting 'Islamist terrorism' as main policy goal*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-france-diplomacy-macron-idUSKCN1B90Z8>
- John Irish, M. P. (2018, March 30). *France's Macron vows support for northern Syrians, Kurdish militia*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france-idUSKBN1H52V1>
- Jones, D. (2011, February 24). *France Still Opposes EU Membership for Turkey*. Retrieved from VOA (Voice of America): <https://www.voanews.com/east-asia/france-still-opposes-eu-membership-turkey>
- Laird, R. (2007). The European Union . *France, Islam and the Chirac presidency: Strategic choices and the decision making framework*, 232-233.
- Macron says 'no progress possible' on Turkey EU bid*. (2018, January 5). Retrieved from Yahoo: <https://sports.yahoo.com/macron-says-no-progress-possible-turkey-eu-bid-164552721.html?guccounter=1>
- Macron tells Erdogan: No chance of Turkey joining EU*. (2018, January 5). Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-42586108>
- McGee, L. (2020, March 2). *A migration crisis and disagreement with Turkey is the last thing Europe needs right now*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2020/03/02/europe/turkey-migrant-crisis-european-union-intl/index.html>
- Muliyani, E. (2017). Orientasi Politik Luar Negeri Perancis di bawah kepemimpinan Nicholas Sarkozy. In U. M. Yogyakarta, *Peran Perancis dalam Mediasi konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Francois Hollande (2012-2016)* (pp. 52-53). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nijkerk, M. (2019). Challenge Facing President Macron. *France's Role in Syrian Reconstruction, and the Implication for Israel*, 57-59.
- Onuf, N. (1998). Constructivism: A User's Manual, Overview. In N. Onuf, *International Relations in a Constructed worlds* (p. 59). New York: Taylor and Francis Group.
- Örmeci, P. D. (2016). Turkish-French Relations in Recent Years: Signs of Normalization During Hollande Period and Predictions for The Future. *International Multilingual Academic Journal*, 142-144.
- Pierini, M. (2019). The Rule of Law. *Option for the EU-Turkey Relationship*, 4-7.

- rahim, F. (2013). Uni Eropa, Enlargement dan Akses Turki. *Clash of Civilization: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa*, 216-217.
- Rein, H. (2016). French Foreign & Security Policy NRCs under François Hollande 2012-16. In H. Rein, *French Foreign and Security Policy Roles Under Francois Hollande* (pp. 27-35). Swedish: Swedish Defence University.
- Reuters. (2018, January 19). *Turkey's EU minister rejects any option other than full membership*. Retrieved from Egypt today: <https://www.egypttoday.com/Article/1/40491/Turkey-s-EU-minister-rejects-any-option-other-than-full>
- Roth, K. (2019). *Turkey events of 2019*. Retrieved from Human Right Watches: <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/turkey#>
- Saatcioglu, B. (2019). *The European Union's Refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey relations*, 4-13.
- Sait Akşit, Ö. Ş. (2010). A (Strong) Divide between Political Parties and Leaders. In Z. İ. Hizmetleri, *TURKEY WATCH: EU MEMBER STATES PERCEPTIONS ON TURKEY'S ACCESSION TO THE EU* (p. 16). Ankara, Turkey: Zeplin İletişim Hizmetleri.
- Schmid, A. D. (2020). The Political side of the negotiation. In A. D. Schmid, *France and the Modernization of the EU-Turkey Customs Union Interests and Obstacles* (pp. 24-27). Paris: Ifri.
- Shapiro, M. L. (2017, May 8). *Macron's foreign policy: Claiming the tradition*. Retrieved from Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/05/08/macrons-foreign-policy-claiming-the-tradition/>
- Summit, N. (2019, November 28). *Macron is a sponsor of terrorism, says Turkish foreign minister*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-50584935>
- Talinn. (2017, september 07). *EU divided over calls to block Turkey's bid*. Retrieved from Hurriyet Daily News: <https://www.hurriyetaidailynews.com/eu-divided-over-calls-to-block-turkeys-bid-117671>
- Tim dunne, M. K. (2007). the Social construction of Reality. In *International Relations Theories* (pp. 188-189). London: Oxford.
- Times, T. I. (2019, October 12). *France to suspend all weapon sales to Turkey after attacks on Syria*. Retrieved from The Irish Times: <https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/france-to-suspend-all-weapon-sales-to-turkey-after-attacks-on-syria-1.4048866>
- Toumi, A. (2020, Agustus 14). *Turkey-France relations: Deepening cross-purposes*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/opinion/oped/turkey-france-relations-deepening-cross-purposes>
- Union, E. (n.d.). *The European Union*. Retrieved from The European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en
- Vaisse, J. (2008). Nicholas Sarkozy's opposition to Turkey's entrance into the EU. *Slamming the Sublime Porte? Challenge in French-Turkish Relations from Chirac to Sarkozy*, 14-19.
- WIRES, N. (2018, January 15). *Macron suggests 'partnership' with EU for Turkey, not membership*. Retrieved from France24: <https://www.france24.com/en/20180105-french-president-macron-suggests-partnership-deal-turkey-eu-not-membership-erdogan>
- Wires, N. (2019, 12 03). *France's Macron accuses Turkey of 'sometimes working with IS group proxies'*. Retrieved from France24:

- <https://www.france24.com/en/20191203-france-s-macron-accuses-turkey-of-sometimes-working-with-is-group-proxies-at-nato-summit>
- XIn, Z. (2018, 1 6). *Macron suggests no EU membership; Erdogan says Turkey sick of waiting*. Retrieved from XinhuaNet:
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/06/c_136875297_3.htm
- Zehfuss, M. (2004). Word making the world. In M. Zehfuss, *Constructivism in International Relations The Politics of Reality* (pp. 152-153). Cambridge: Cambridge Universe Press.
- Zehfuss, M. (2004). Word making the world. In M. Zehfuss, *Constructivism in International Relations The Politics of Reality* (p. 154). Cambridge: Cambridge University Press.
- Zehfuss, M. (2004). Words and world: onuf's constructivism and German military involent abroad. In M. Zehfuss, *Constructivism in International Relations The Politics of Reality* (p. 151). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Zehfuss, M. (2004). Words making the world. In M. Zehfuss, *Constructivism in International Relations The Politics of Reality* (p. 153). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

